



**PERBAIKAN DESAIN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) SATUAN KERJA
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**



**CIBODAS
2021**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain disebutkan bahwa pada setiap awal tahun Unit Pelaksana Teknis wajib menyusun Desain Penyelenggaraan SPIP.

Mengacu pada dasar hukum di atas, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) telah menyusun Desain Penyelenggaraan SPIP Tahun 2021. Penyusunan desain dimaksud didasarkan pada tugas pokok dan fungsi satuan kerja maupun kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien yang berisi hasil analisis dan rencana kegiatan pengendalian secara intern BBTNGGP.

Dengan telah selesainya Penyusunan dan perbaikan Desain Penyelenggaraan SPIP Tahun 2021 hasil review dari Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dan berkontribusi dalam proses penyusunannya. Semoga desain ini dapat memberikan arahan yang jelas dan dapat menjadi pedoman bagi semua pegawai dalam melakukan pengendalian intern terhadap semua kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Namun demikian, kami menyadari bahwa desain ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami harapkan kritik dan saran yang membangun guna sempurnanya dokumen ini.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
BAB II. ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN	
A. Penilaian/ Pemetaan Efektivitas Lingkungan.....	3
B. Rencana Tindakan Perbaikan Lingkungan Pengendalian.....	7
BAB III. PENILAIAN RISIKO	
A. Identifikasi Risiko.....	8
B. Analisis Risiko.....	42
BAB IV. RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN	66
BAB V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	73
BAB VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI	75
BAB VII. PENUTUP.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1.	Hasil Penilaian/ Pemetaan Efektivitas Lingkungan Pengendalian.....	3
3.1.	Pagu Anggaran Kegiatan Balai Besar TNGGP Tahun 2021	8
3.2.	Rekapitulasi Risiko Teridentifikasi	12
3.3.	Ilustrasi Peta Risiko	31
3.4.	Hasil Penilaian Bobot Atas Risiko Teridentifikasi	42
3.5.	Rekapitulasi Risiko Signifikan	64
4.1.	Rencana Pengendalian Prosedur Smart Patrol bersama masyarakat	66
4.2.	Rencana Pengendalian Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Patroli Penanganan/Supervisi Tindak Lanjut Informasi Terhadap Pelaporan Masyarakat/Gangguan Kawasan.....	67
4.3.	Rencana Pengendalian Kegiatan Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di 3 (Tiga) Bidang Wilayah	67
4.4.	Rencana Pengendalian Training ISO 14001:2015 (Audit dan Pemahaman)....	68
4.5.	Rencana Pengendalian Antisipasi Pengamanan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian Bersama Instansi Terkait Lingkup TNGGP	69
4.6.	Rencana Pengendalian Evaluasi Perjanjian Kerjasama	69
4.7.	Rencana Pengendalian Penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2022	70
4.8.	Rencana Pengendalian Penyusunan Laporan Keuangan SAI dan SIMAK (Bulanan, Semester, Unaudited dan Audited)	71
4.9.	Rencana Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan SPIP	71
4.9.	Rencana Pengendalian Perhitungan Dokumen CCO	72
5.1.	Informasi dan Komunikasi Terkait Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	73
6.1.	Rencana Pemantauan Kegiatan dan Evaluasi	75
6.2.	Pemantauan Penyelenggaraan SPIP (Triwulanan)	76
6.3	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP (Tahunan).....	77

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Uraian
1.	SOP Smart Patrol Terkait Pengamanan Jalur Pendakian dan Wisata Alam.
2.	SOP Patroli Penanganan/Supervisi Tindak Lanjut Informasi Terhadap Pelaporan Masyarakat/Gangguan Kawasan.
3.	SOP Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Di 3 (Tiga) Bidang Wilayah.
4.	SOP Training ISO 14001:2015/Audited dan Pemahaman.
5.	SOP Antisipasi Pengamanan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian Bersama Instansi Terkait Lingkup TNGGP.
6.	SOP Evaluasi Perjanjian Kerjasama.
7.	SOP Evaluasi Perjanjian Kerjasama.
8.	SOP Penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2022.
9.	SOP Penyusunan Laporan Keuangan SAI dan SIMAK – Bulanan, Semesteran, Unaudited dan Audited.
10.	SOP Penyelenggaraan Kegiatan SPIP.
11.	SOP Perhitungan Dokumen CCO.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan pedoman untuk instansi pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern. Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif, ekonomis, dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, keamanan pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN), serta ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP telah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memuat acuan tentang penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dimaksudkan untuk memberi arahan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dapat terlaksana secara tertib, terkendali serta efektif, dan efisien.

Dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) perlu adanya pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah konkret yang dilaksanakan dalam bentuk desain penyelenggaraan. Dengan demikian dapat dengan mudah dilaksanakan, dimonitor, dan dievaluasi kelancaran penyelenggarannya.

Penyusunan desain penyelenggaraan SPIP lingkup Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dilaksanakan dengan memperhatikan standar dan panduan pedoman penyusunan desain penyelenggaraan SPIP berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. PER-687/K/D4/2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Desain penyelenggaraan SPIP Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini diharapkan dapat memberikan arah penyelenggaraan BBTNGGP dalam mengembangkan dan menyelenggarakan SPIP sehingga diharapkan tercipta kesamaan persepsi penyelenggaraan SPIP lingkup BBTNGGP.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yaitu untuk merumuskan dan mengarahkan strategi dan rencana kerja penyelenggaraan SPIP agar dapat terselenggara secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku.

II. ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN

A. Penilaian/ Pemetaan Efektivitas Lingkungan

Penilaian/ Pemetaan Efektivitas Lingkungan Pengendalian dilakukan terhadap sub unsur-sub unsur dari unsur Lingkungan Pengendalian yang ada saat ini (*existing*). Tujuannya adalah untuk mengetahui sub unsur-sub unsur mana yang dapat dikategorikan baik, cukup, atau kurang. Terhadap sub unsur yang berkategori kurang, ditindaklanjuti dengan menyusun/ merumuskan bentuk tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan, guna meminimalisir risiko yang akan terjadi.

Sub unsur dari unsur Lingkungan Pengendalian yang perlu dipetakan/ dinilai dan didokumentasikan yaitu sub unsur yang berada di dalam batas kewenangan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang mencakup:

- a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika;
- b. Komitmen terhadap Kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang Kondusif;
- d. Pendeklasian Wewenang dan Tanggung Jawab;
- e. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
- f. Hubungan Kerja yang Baik.

Dalam rangka Penilaian/ Pemetaan Efektivitas Lingkungan Pengendalian, pegawai Balai Besar TNGGP sebanyak 114 orang telah mengisi kuesioner melalui online pada link <https://simawas.itjen.menlhk.go.id/survey/login>. Berdasarkan hasil Penilaian/ Pemetaan Efektivitas Lingkungan Pengendalian yang dilaksanakan melalui pengisian kuesioner/ *Focus Group Discussion* (FGD), diperoleh kondisi Lingkungan Pengendalian di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagai berikut:

Tabel 2.1. Hasil Penilaian/ Pemetaan Efektivitas Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian (orang)		Rencana Tindak Perbaikan
			Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	a Apakah satker telah menerapkan aturan perilaku dan kode etik PNS	113	1	-

No	Sub Unsur	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian (orang)		Rencana Tindak Perbaikan
			Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	
2	Komitmen terhadap Kompetensi	b	Apakah unsur pimpinan telah memberikan penghargaan kepada pegawai berdasarkan prestasi dan kinerja.	111	3
		c	Apakah unsur pimpinan satker telah menerapkan tindakan disiplin yang tepat terhadap penyimpangan kebijakan prosedur atau pelanggaran aturan perilaku	109	5
		d	Apakah unsur pimpinan satker telah memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku dan kode etik pada setiap tingkatan pimpinan satker.	112	2
		e	Apakah unsur pimpinan telah menyusun kebijakan dan target penugasan yang realistik.	109	5
		a	Apakah satker telah mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi/jabatan.	109	5
3	Peningkatan Kompetensi	b	Apakah telah disusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing fungsi/jabatan.	104	10
		c	Apakah satker telah menyusun rencana peningkatan kompetensi bagi pegawainya.	102	12
		d	Apakah satker telah menyusun rencana peningkatan kompetensi bagi pegawainya.	102	12

No	Sub Unsur	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian (orang)		Rencana Tindak Perbaikan
			Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	
3	Kepemimpinan yang Kondusif	<p>Apakah pimpinan telah memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang cukup dalam pengelolaan instansi pemerintah.</p> <p>Apakah unsur pimpinan satker sudah mempertimbangkan faktor risiko dalam setiap pengambilan keputusan.</p> <p>Apakah unsur pimpinan satker telah menerapkan manajemen berbasis kinerja.</p> <p>Apakah unsur pimpinan satker telah memberikan dukungan yang memadai dalam hal penyusunan laporan keuangan, pengelolaan pegawai, dan pengawasan.</p> <p>Apakah unsur pimpinan satker melakukan interaksi yang cukup intensif dengan level dibawahnya.</p> <p>Apakah unsur pimpinan satker memiliki sikap yang positif dan responsif terhadap laporan-laporan yang terkait dengan kegiatan, penganggaran, dan keuangan.</p> <p>Apakah unsur pimpinan telah menetapkan mutasi pegawai berdasarkan pola mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	112	2	-
			108	6	-
			108	6	-
			105	9	-
			99	15	-
			108	6	-
4	Pendeklegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	<p>Apakah wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat</p>	104	10	-
			110	4	-

No	Sub Unsur	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian (orang)		Rencana Tindak Perbaikan
			Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	
5	Pembinaan SDM	sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya.			
			Apakah pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diterimanya itu terkait dengan pihak lain di dalam instansinya, dan juga terkait dengan sistem pengendalian.	112	2
					-
		Apakah pimpinan telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penyelegasian wewenang dan tanggung jawab.			
			Apakah unsur pimpinan satker telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan ketepatan pelaksanaan pekerjaan, mengurangi kesalahpahaman, dan mendorong berkurangnya tindak pelanggaran.	108	6
					-
		Apakah unsur pimpinan satker berupaya agar pegawai memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta memahami apa yang diharapkan pimpinannya.			
			Apakah unsur pimpinan satker berupaya agar pegawai memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta memahami apa yang diharapkan pimpinannya.	110	4
					-
6	Hubungan Kerja yang Baik	Apakah satker memiliki hubungan kerja yang baik dengan Kementerian Keuangan.			
			Apakah satker memiliki hubungan kerja yang baik dengan Kementerian Keuangan.	114	0
		Apakah satker memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi pengawasan.			
			Apakah satker memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi pengawasan.	113	1
					-

No	Sub Unsur	Parameter Penilaian	Hasil Penilaian (orang)		Rencana Tindak Perbaikan
			Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	
	c	Apakah satker memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi/lembaga terkait lainnya.	112	2	-

Catatan: *) kolom 5 diisi jika hasil penilaian pada kolom 4 lebih banyak jawaban "tidak"

B. Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil Penilaian Efektivitas Lingkungan Pengendalian, maka parameter-parameter yang sebagian besar menjawab/ menanggapi "Tidak" dilakukan perbaikan dengan menyusun rencana tindak perbaikan/ penguatannya. Untuk tahun 2021, rencana tindak perbaikan/ penguatan Lingkungan Pengendalian pada Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tidak ada karena semua parameter penilaian unsur Lingkungan Pengendalian sebagian besar menjawab/ menanggapi "Ya" (Tabel 2.1).

III. PENILAIAN RISIKO

Tahap kedua dalam menyusun desain penyelenggaraan SPIP adalah penilaian risiko. Risiko dalam pengertian sederhana adalah segala kemungkinan yang diperkirakan menghambat atau akan menggagalkan tercapainya tujuan suatu kegiatan. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko.

A. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah mencari atau mengeksplorasi wilayah yang diperkirakan mengandung risiko yang kemungkinan dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan suatu kegiatan, sekaligus memprediksi jenis risikonya. Identifikasi risiko dilakukan dengan cara melakukan pemetaan risiko yang dipetakan meliputi:

1. Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang tercantum dalam dokumen anggaran.

Identifikasi risiko bersumber dari kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi organisasi, dilakukan dengan menginventarisasi kegiatan DIPA. Balai Besar TNGGP pada tahun 2021 didukung dengan anggaran sebesar Rp 25.248.150.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Rupiah). Adapun Pagu dari masing-masing kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pagu Anggaran Kegiatan Balai Besar TNGGP Tahun 2021

No	Kegiatan	Pagu
1	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	478.920.000
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi	2.322.000.000
3	Konservasi Spesies dan Genetik	420.700.000
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	75.400.000
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	19.521.663.000
Total		22.818.683.000

2. Hasil pencermatan/ monitoring/ evaluasi yang dilakukan Itjen terhadap tugas dan fungsi Balai Besar TNGGP Tahun 2020.

Dari hasil pendampingan audit Kinerja Pelaksanaan TUSI tahun 2020 oleh Inspektorat Jenderal, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Terhadap belanja barang dan jasa untuk penanganan pandemi COVID 19 dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh);
- b. Sasaran pelaksanaan rapid dan swab test tidak tepat;
- c. Penyesuaian Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) belum dilakukan;
- d. Penyusunan laporan keuangan belum sesuai ketentuan;
- e. Administrasi kepegawaian belum tertib;
- f. Pemberian tunjangan kinerja belum sesuai ketetuan;
- g. Honorarium pengelola keuangan tidak sesuai ketentuan;
- h. Biaya konsumsi rapat belum sesuai ketentuan;
- i. Pembayaran upah kerja buruh melebihi standar biaya kegiatan;
- j. Pembelian pakan satwa belum sesuai ketentuan;
- k. Surat perjanjian sewa menyewa rumah untuk pejabat eselon III belum sesuai ketentuan;
- l. Pembelian alat rapid tes mandiri dan alat makan mandiri edukasi COVID 19 belum dimasukan ke dalam persediaan;
- m. Perjanjian kerja sama antara BBTNGP dengan Yayasan Owa Jawa belum jelas ketetuannya;
- n. Pembelian *personal use* berupa kemeja lapangan melebihi standar biaya kegiatan dan belum dicatat sebagai persediaan.

Identifikasi risiko dilakukan terhadap semua kegiatan yang ada di dalam DIPA dan tugas atau kegiatan yang harus dilakukan tetapi tidak tercantum dalam DIPA Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021. Identifikasi risiko ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis-jenis dan area-area atau wilayah risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan masing-masing kegiatan.

Kegiatan yang dianggap berisiko pada tahun 2021 berdasarkan dari kegiatan RKAKL Tahun 2021, hasil pendampingan tim auditor dari Inspektorat Jenderal KLHK tahun 2020, maupun terkait tugas dan fungsi taman nasional (non DIPA) dan kegiatan pendukung yaitu:

Kegiatan utama:

- 1) Pengurusan Administrasi Pemegang Senjata Api;
- 2) Pengurusan Administrasi Senjata Api;
- 3) Smart patrol terkait pengamanan jalur pendakian dan wisata alam;
- 4) Patroli Penanganan/ Supervisi Tindak Lanjut Informasi Terhadap Pelaporan Masyarakat/ Gangguan Kawasan;
- 5) Identifikasi Bioprospecting;
- 6) Pengurusan Administrasi KTA POLHUT;
- 7) Evaluasi kemitraan konservasi;
- 8) Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di 3 (Tiga) Bidang Wilayah;
- 9) Monitoring KTH Wisata (Cimacan, Sindangjaya, Gekbrong, Ambarjaya, Benda dan Cileungsi);
- 10) Pendampingan Kelompok Masyarakat;
- 11) Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Pemberian Akses Kelola Terbatas;
- 12) Inventarisasi Potensi Satwa Liar Tingkat Resort;
- 13) Penandaan Batas Zona Pengelolaan;
- 14) Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP;
- 15) Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Zona/ Blok Tradisional Di TNGGP;
- 16) Identifikasi Aspek Lingkungan Pendukung ISO 14001:2015 / Pendampingan ISO 9001:2015;
- 17) Audit Eksternal ISO;
- 18) Audit Internal ISO;
- 19) Training ISO 14001:2015 (Audit dan Pemahaman);
- 20) Pengkayaan (25 Ha);
- 21) Pembibitan Dalam Rangka Pemuliharaan Ekosistem;
- 22) Pemuliharaan Ekosistem Dengan Mekanisme Alam;
- 23) Pembibitan Dalam Rangka pemeliharaan Tahun ke 1 (P1) Pemuliharaan Ekosistem;
- 24) Pemeliharaan Tahun I Pemuliharaan Ekosistem
- 25) Pengendalian Jenis Invasif/ Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual);
- 26) Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan TNGGP;
- 27) Pemadaman Kebakaran Bersama Para Pihak;
- 28) Penanganan Satwa Transit dan Konflik;
- 29) Evakuasi Kecelakaan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian lingkup TNGGP;
- 30) Antisipasi Pengamanan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian Bersama Instansi terkait lingkup TNGGP;

- 31) Monitoring Macan Tutul (Luas Site di Jublegan Cianjur 2.720 Ha, Luas Non Site di Sukabumi dan Bogor Ha);
- 32) SMART Patrol Bersama Masyarakat Mitra POLHUT;
- 33) Monitoring Elang Jawa (Luas Site di Situgunung 3.477 Ha, Luas Non Site di Cianjur dan Bogor Ha);
- 34) Peningkatan Kapasitas Pegawai dan KTH;
- 35) Pembinaan KTH penerima akses pemanfaatan HHBK Pada Bidang PTN II dan III;
- 36) Operasional Javan Gibbon Centre;
- 37) Monitoring Owa Jawa (Luas Site di Bogor 2.759 Ha, Luas Non Site di Cianjur dan Sukabumi Ha);
- 38) Smart Patrol Pencegahan Kebakaran Hutan/ Illegal Logging/ Kerusakan Kehati tingkat Bidang Wilayah.

Kegiatan penunjang:

- 39) Evaluasi Perjanjian Kerjasama;
- 40) Pembahasan/ Penandatanganan Perjanjian Kerjasama;
- 41) Penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2022;
- 42) Penyusunan RKA-K/L 2022;
- 43) Sosialisasi Peraturan Terkait Revisi DIPA dan Pencairan Anggaran TA 2021;
- 44) Inhouse Training Lingkup Balai Besar;
- 45) Evaluasi Inhouse Training Lingkup Kantor Balai Besar;
- 46) Fasilitasi Pengamanan dan Pelayanan Kawasan Konservasi;
- 47) Fasilitasi Pertemuan Terkait Pengamanan Kawasan BBTNGGP;
- 48) Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19;
- 49) Penyusunan Grand Design Dokumen Zona Integritas Menuju WBK;
- 50) Penghapusan BMN;
- 51) Penyusunan Laporan Keuangan SAI dan SIMAK (Bulanan, Semester, Unaudited dan Audited);
- 52) Pengelolaan PNBP;
- 53) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran);
- 54) Penyusunan RK BMN;
- 55) Pemuktahiran Data Pegawai;
- 56) Penyelenggaraan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional;
- 57) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran;
- 58) Pencetakan Bahan Promosi Pendukung Pengelolaan Kawasan;
- 59) Digitalisasi Perpustakaan Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango;

- 60) Penyelenggaraan Kegiatan SPIP;
- 61) Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) 2020;
- 62) Penyusunan Laporan Capaian Renja 2020;
- 63) Penyusunan Laporan Statistik;
- 64) Perhitungan Dokumen CCO;
- 65) Terdapat kerusakan kecil pada pagar shelter dan beda jenis MCB listrik antara dokumen kontrak dan kondisi lapangan;
- 66) Terdapat cat pada dinding bangunan toilet yang mulai kotor.

Hasil identifikasi risiko yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 diperoleh peta dan daftar risiko teridentifikasi sebagai berikut.

Tabel 3.2. Rekapitulasi Risiko Teridentifikasi

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
I Kegiatan Utama				
1.	Pengurusan Administrasi Pemegang Senjata Api	Pengusulan personil calon pemegang senjata api	Daftar personil pemegang senjata api tidak terpenuhi	R1
		Pemenuhan persyaratan personil pemegang senjata api	Persyaratan personil pemegang senjata api tidak terpenuhi	R2
		Koordinasi dengan POLRI dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi	Uji kompetensi tidak terjadwalan	R3
		Pelaksanaan uji kompetensi pemegang senjata api	Pelaksanaan uji kompetensi tidak terlaksana	R4
		Koordinasi dengan POLRI dalam rangka penerbitan Pemegang Izin Senjata Api	Pemegang Izin Senjata Api tidak terbit	R5
		Penetapan personil pemegang senjata api	Terjadi penyalahgunaan wewenang penggunaan senjata api	R6
2.	Pengurusan Administrasi Senjata Api	Pendataan kelengkapan dokumen senjata api	Dokumen senjata api tidak lengkap	R7
		Pengecekan fisik senjata api	BA pengecekan fisik senjata api tidak terbit	R8
		Uji Balistik senjata api	Senjata api tidak teridentifikasi	R9
		Koordinasi dalam rangka pengurusan administrasi senjata api	Terjadi penyalahgunaan wewenang penggunaan senjata api	R10

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
3.	Smart patrol terkait pengamanan jalur pendakian dan wisata alam	Penunjukan Tim Smart patrol terkait pengamanan jalur pendakian dan wisata alam	Tim smart patrol tidak terbentuk	R11
		Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Smart patrol terkait pengamanan jalur pendakian dan wisata alam	Rencana Pelaksanaan Kegiatan tidak tersusun	R12
		Pelaksanaan Smart patrol terkait pengamanan jalur pendakian dan wisata alam	Potensial kerugian negara (PNBP)	R13
		Tim Smart patrol jalur pendakian dan wisata alam melaporkan hasil patroli	Hasil Smart Patrol tidak terlaporkan	R14
4.	Patroli Penanganan/ Supervisi Tindak Lanjut Informasi Terhadap Pelaporan Masyarakat/ Gangguan Kawasan	Mengecek kebenaran informasi	informasi tidak terkonfirmasi	R15
		Menyusun tim tindak lanjut Pelaporan Masyarakat/ Gangguan Kawasan	Sarpras tidak mendukung dan Surat Tugas patroli terlambat	R16
		Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan tindak lanjut Pelaporan Masyarakat/ Gangguan Kawasan	Patroli tidak tepat sasaran	R17
		Pelaksanaan Kegiatan tindak lanjut Pelaporan Masyarakat/ Gangguan Kawasan	Pengambilan keputusan terlambat	R18
		Digitalsisasi dokumentasi hasil patroli	Dokumentasi hasil Patroli tidak terdigitalisasi	R19
5.	Identifikasi Bioprospecting	Pembentukan tim pengumpulan data bioprospecting	Tim pengumpul data bioprospecting tidak terbentuk	R20
		Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Sample Uji Bioprospecting	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Sample Uji Bioprospecting tidak tersusun	R21
		Pelaksanaan pengumpulan sample uji bioprospecting	Sample Bioprospecting tidak terkumpul	R22
		Penanganan sample uji bioprospecting	Sample uji bioprospecting rusak	R23
		Koordinasi dengan laboratorium dalam	Laboratorium dalam rangka Uji Sample	R24

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
		rangka Uji Sample Bioprospecting	Bioprospecting tidak tersedia	
		Koordinasi dengan narasumber dalam rangka analisis hasil uji sample bioprospecting	Hasil uji sample laboratorium tidak teranalisa	R25
		Pelaporan	Laporan tidak tersusun	R26
6.	Pengurusan Administrasi KTA POLHUT	Pendataan kelengkapan administrasi KTA POLHUT	Kelengkapan Administrasi KTA POLHHUT tidak tersedia	R27
		Pengusulan administrasi KTA POLHUT ke POLDA	Adminitrasi KTA POLHUT tidak tersampaikan ke POLDA	R28
		Koordinasi ke POLDA dalam rangka penerbitan KTA POLHUT	KTA POLHUT tidak diterbitkan POLDA	R29
		Distribusi KTA kepada personil POLHUT	KTA POLHUT tidak terdistribusikan kepada personil POLHUT	R30
7.	Evaluasi kemitraan konservasi	Membentuk tim evaluasi Kemitraan Konservasi	Tim Evaluasi Kemitraan Konservasi tidak terbentuk	R31
		Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kemitraan Konservasi	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kemitraan Konservasi tidak tersusun	R32
		Menyusun tallysheet evaluasi kemitraan konservasi	Tallysheet Evaluasi Kemitraan Konservasi tidak tersusun	R33
		Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kemitraan Konservasi	Pelaksanaan kegiatan evaluasi kemitraan konservasi tidak terlaksana	R34
		Analisis hasil evaluasi kemitraan konservasi	Hasil evaluasi kemitraan konservasi tidak teranalisa	R35
		Menyusun laporan hasil evaluasi kemitraan konservasi	Laporan hasil evaluasi kemitraan konservasi tidak tersusun	R36
8.	Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di 3 (Tiga) Bidang Wilayah	Menetapkan pembentukan panitia pelaksana	SK panitia tidak terbentuk	R37
		Menentukan sasaran calon peserta pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Calon peserta pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat tidak tepat sasaran	R38
		Koordinasi dengan narasumber Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Narasumber Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat tidak kompeten	R39

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
		Pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat tidak terlaksana	R40
		Penyusunan laporan kegiatan Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat tidak tersusun	R41
		Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pelatihan tidak tepat sasaran	R42
9.	Monitoring KTH Wisata (Cimacan, Sindangjaya, Gekbrong, Ambarjaya, Benda dan Cileungsi)	Menunjuk personil pelaksana Monitoring KTH Wisata	Surat Tugas personil pelaksana Monitoring KTH Wisata tidak terbit	R43
		Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Monitoring KTH Wisata	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Monitoring KTH Wisata tidak tersusun	R44
		Melaksanakan kegiatan Monitoring KTH Wisata	Kegiatan Monitoring KTH Wisata tidak terlaksana	R45
		Menyusun laporan hasil monitoring KTH Wisata	Laporan hasil monitoring KTH Wisata tidak tersusun	R46
10.	Pendampingan Kelompok Masyarakat	Menugaskan tim	Surat penugasan terlambat	R47
		Melaksanakan pendampingan	Jadwal pelaksanaan pendampingan terlambat	R48
		Menyusun laporan hasil pendampingan	Penyusunan laporan hasil penampungan terlambat	R49
11.	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Pemberian Akses Kelola Terbatas	Penetapan tim pelaksana Pembentukan Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Pemberian Akses Kelola Terbatas	Tim pelaksana Pembentukan Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Pemberian Akses Kelola Terbatas tidak terbentuk	R50
		Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Pemberian Akses Kelola Terbatas	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Pemberian Akses Kelola Terbatas tidak tersusun	R51
		Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Pemberian Akses Kelola Terbatas	Kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Pemberian Akses Kelola Terbatas tidak terlaksana	R52
		Menyusun laporan hasil kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Pemberian Akses Kelola Terbatas	Laporan hasil kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Pemberian	R53

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
		Pemberian Akses Kelola Terbatas	Akses Kelola Terbatas tidak tersusun	
12.	Invetarisasi Potensi Satwa Liar Tingkat Resort	Pembentukan tim pelaksana Invetarisasi Potensi Satwa Liar Tingkat Resort	Tim pelaksana Invetarisasi Potensi Satwa Liar Tingkat Resort tidak terbentuk	R54
		Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Invetarisasi Potensi Satwa Liar Tingkat Resort	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Invetarisasi Potensi Satwa Liar Tingkat Resort tidak tersusun	R55
		Pelaksanaan Kegiatan Invetarisasi Potensi Satwa Liar Tingkat Resort	Kegiatan Invetarisasi Potensi Satwa Liar Tingkat Resort tidak terlaksana	R56
		Menyusun hasil laporan Kegiatan Invetarisasi Potensi Satwa Liar Tingkat Resort	Laporan Kegiatan Invetarisasi Potensi Satwa Liar Tingkat Resort tidak tersusun	R57
13.	Penandaan Batas Zona Pengelolaan	Pembentukan tim pelaksana Penandaan Batas Zona Pengelolaan	Tim pelaksana Penandaan Batas Zona Pengelolaan tidak terbentuk	R58
		Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penandaan Batas Zona Pengelolaan	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penandaan Batas Zona Pengelolaan tidak tersusun	R59
		Pembelian bahan tanda batas zona pengelolaan	Bahan tanda batas zona pengelolaan tidak tersedia	R60
		Pelaksanaan Kegiatan Penandaan Batas Zona Pengelolaan	Tanda Batas Zona Pengelolaan tidak terpasang	R61
		Menyusun laporan hasil Kegiatan Penandaan Batas Zona Pengelolaan	Laporan hasil Kegiatan Penandaan Batas Zona Pengelolaan tidak tersusun	R62
14.	Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP	Pembentukan tim pelaksana Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP	Tim pelaksana Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP tidak terbentuk	R63
		Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP tidak tersusun	R64
		Koordinasi Kegiatan Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP dengan BIG	Koordinasi Kegiatan Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP dengan BIG tidak terlaksana	R65

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
		Melakukan analisis Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP	Data hasil Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP tidak teranalisis	R66
		Melakukan ground check lapangan hasil analisis data tutupan lahan	Ground check lapangan hasil analisis data tutupan lahan tidak terlaksana	R67
		Menyusun Peta Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP	Peta Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP tidak tersusun	R68
		Menyusun hasil laporan kegiatan Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP	Laporan kegiatan Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP tidak tersusun	R69
15.	Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Zona/ Blok Tradisional Di TNGGP	Pembentukan tim pelaksana Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Zona/ Blok Tradisional Di TNGGP	Tim pelaksana Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Zona/ Blok Tradisional Di TNGGP tidak tebentuk	R70
		Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Zona/ Blok Tradisional Di TNGGP	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Zona/ Blok Tradisional Di TNGGP tidak tersusun	R71
		Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Zona/ Blok Tradisional Di TNGGP	Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Zona/ Blok Tradisional Di TNGGP tidak terlaksana	R72
		Menyusun hasil laporan Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Zona/ Blok Tradisional Di TNGGP	Laporan Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Zona/ Blok Tradisional Di TNGGP tidak tersusun	R73
16.	Identifikasi Aspek Lingkungan Pendukung ISO 14001:2015 / Pendampingan ISO 9001:2015	Koordinasi dengan konsultan	Koordinasi dengan konsultan tidak terlaksana	R74
		Menyusun Surat Perintah Kerja (SPK) Identifikasi Aspek Lingkungan Pendukung ISO 14001:2015 / Pendampingan ISO 9001:2015	Sertifikat ISO 9001:2015 tidak terbit	R75
17.	Audit Eksternal ISO	Koordinasi dengan konsultan audit ISO	Menyusun Surat Perintah Kerja (SPK) Audit pengawasan ISO	R76

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
		Koordinasi dengan konsultan audit pengawasan ISO	Konsultan audit pengawasan ISO tidak tersedia	R77
		Menyusun Surat Perintah Kerja (SPK) Audit Eksternal ISO	Surat Perintah Kerja (SPK) Audit Eksternal ISO tidak tersusun	R78
18.	Audit Internal ISO	Menugaskan auditor internal ISO	Tim Audit Internal ISO tidak terbentuk	R79
		Penyusunan Rencana Pelaksanaan Audit Internal ISO	Rencana Pelaksanaan Audit Internal ISO tidak tersusun	R80
		Pelaksanaan Audit Internal ISO	Audit Internal ISO tidak terlaksana	R81
		Penyusunan Laporan Hasil Audit Internal ISO	Laporan Hasil Audit Internal ISO tidak tersusun	R82
19.	Training ISO 14001:2015 (Audit dan Pemahaman)	Menugaskan calon peserta Training ISO 14001:2015	Calon peserta tidak sesuai sasaran	R83
		Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Training ISO 14001:2015	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Training ISO 14001:2015 tidak tersusun	R84
		Koordinasi dengan narasumber Training ISO 14001:2015	Narasumber Training ISO 14001:2015 tidak tersedia	R85
		Pelaksanaan Training ISO 14001:2015	Training ISO 14001:2015 tidak terlaksana	R86
		Menyusun laporan Training ISO 14001:2015	Laporan Training ISO 14001:2015 tidak tersusun	R87
		Evaluasi Training ISO 14001:2015	Training ISO 14001:2015 tidak sesuai dengan kebutuhan	R88
20.	Pengkayaan (25 Ha)	Pembentukan Pelaksana Kegiatan Pengkayaan	Pelaksana Kegiatan Pengkayaan tidak terbentuk	R89
		Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengakayaan	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengakayaan tidak tersusun	R90
		Pelaksanaan kegiatan pengkayaan	Waktu pengerjaan melebihi waktu yang ditargetkan	R91
		Menyusun hasil laporan pengkayaan	Laporan hasil kegiatan pengkayaan tidak tersusun	R92
21.	Pembibitan Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem	Menyusun Surat Perintah Kerja (SPK) Pelaksana Pembibitan dalam rangka Pemulihan Ekosistem	Surat Perintah Kerja (SPK) Pelaksana Pembibitan dalam rangka Pemulihan Ekosistem tidak tersusun	R93

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
		Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembibitan Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembibitan Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem tidak tersusun	R94
		Pelaksanaan kegiatan Pembibitan Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem	Bibit dalam rangka pemulihan ekosistem tidak tersedia	R95
		Menyusun hasil laporan Pembibitan Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem	Laporan Pembibitan Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem tidak tersusun	R96
22.	Pemulihan Ekosistem Dengan Mekanisme Alam	Pembentukan tim Pemulihan Ekosistem Dengan Mekanisme Alam	Tim Pemulihan Ekosistem Dengan Mekanisme Alam tidak terbentuk	R97
		Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem Dengan Mekanisme Alam	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem Dengan Mekanisme Alam tidak tersusun	R98
		Pelaksanaan kegiatan Pemulihan Ekosistem Dengan Mekanisme Alam	Kawasan dengan kategori kerusakan ringan tidak terpulihkan	R99
		Menyusun hasil laporan kegiatan Pemulihan Ekosistem Dengan Mekanisme Alam	Laporan kegiatan Pemulihan Ekosistem Dengan Mekanisme Alam tidak tersusun	R100
23.	Pembibitan Dalam Rangka pemeliharaan Tahun ke 1 (P1) Pemulihan Ekosistem	Menyusun Surat Perintah Kerja (SPK) Pelaksana Pembibitan Dalam Rangka pemeliharaan Tahun ke 1 (P1) Pemulihan Ekosistem	Menyusun hasil laporan Pembibitan Dalam Rangka pemeliharaan Tahun ke 1 (P1) Pemulihan Ekosistem	R101
		Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembibitan Dalam Rangka pemeliharaan Tahun ke 1 (P1) Pemulihan Ekosistem	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembibitan Dalam Rangka pemeliharaan Tahun ke 1 (P1) Pemulihan Ekosistem tidak tersusun	R102
		Pelaksanaan kegiatan Pembibitan Dalam Rangka pemeliharaan Tahun ke 1 (P1) Pemulihan Ekosistem	Bibit Dalam Rangka pemeliharaan Tahun ke 1 (P1) Pemulihan Ekosistem tidak tersedia	R103
		Menyusun hasil laporan Pembibitan Dalam Rangka pemeliharaan Tahun ke 1 (P1) Pemulihan Ekosistem	Laporan kegiatan Pembibitan Dalam Rangka pemeliharaan Tahun ke 1 (P1)	R104

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
			Pemulihan Ekosistem tidak tersusun	
24.	Pemeliharaan Tahun I Pemulihan Ekosistem	Penugasan personil Pemeliharaan Tahun I Pemulihan Ekosistem	Personil Pemeliharaan Tahun I Pemulihan Ekosistem tidak ditugaskan	R105
		Penyusunan Surat Perintah Kerja (SPK) Pemeliharaan Tahun I Pemulihan Ekosistem	Surat Perintah Kerja (SPK) Pemeliharaan Tahun I Pemulihan Ekosistem tidak tersusun	R106
		Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tahun I Pemulihan Ekosistem	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tahun I Pemulihan Ekosistem tidak tersusun	R107
		Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Tahun I Pemulihan Ekosistem	Kegiatan Pemeliharaan Tahun I Pemulihan Ekosistem tidak terkaksana	R108
		Menyusun laporan Pemeliharaan Tahun I Pemulihan Ekosistem	Laporan Pemeliharaan Tahun I Pemulihan Ekosistem tidak tersusun	R109
25.	Pengendalian Jenis Invasif/Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual)	Pembentukan Tim Pelaksana Pengendalian Jenis Invasif/Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual)	Tim Pelaksana Pengendalian Jenis Invasif/Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual) tidak terbentuk	R110
		Penyusunan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengendalian Jenis Invasif/Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual)	Surat Perintah Kerja (SPK) Pengendalian Jenis Invasif/Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual) tidak tersusun	R111
		Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Jenis Invasif/Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Jenis Invasif/Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual) tidak tersusun	R112
		Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Jenis Invasif/Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual)	Kegiatan Pengendalian Jenis Invasif/Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual) tidak terlaksana	R113
		Menyusun laporan Kegiatan Pengendalian Jenis Invasif/Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual)	Laporan Kegiatan Pengendalian Jenis Invasif/Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual) tidak tersusun	R114
26.	Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan TNGGP	Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Efektifitas	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Efektifitas Pengelolaan	R115

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
		Pengelolaan Kawasan TNGGP	Kawasan TNGGP tidak tersusun	
		Koordinasi dengan fasilitator METT tingkat pusat	Fasilitator METT tingkat pusat tidak tersedia	R116
		Pelaksanaan kegiatan Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan TNGGP	Nilai METT TNGGP tidak terupdate	R117
		Menyusun laporan Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan TNGGP	Laporan Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan TNGGP tidak tersusun	R118
27.	Pemadaman Kebakaran Bersama Para Pihak	Pembentukan tim pelaksana Pemadaman Kebakaran Bersama Para Pihak	Tim pelaksana Pemadaman Kebakaran Bersama Para Pihak tidak terbentuk	R119
		Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Bersama Para Pihak	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Bersama Para Pihak tidak tersusun	R120
		Pelaksanaan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Bersama Para Pihak	Rusaknya kawasan akibat kebaran	R121
		Menyusun laporan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Bersama Para Pihak	Laporan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Bersama Para Pihak tidak tersusun	R122
28.	Penanganan Satwa Transit dan Konflik	Pembentukan tim pelaksana Penanganan Satwa Transit dan Konflik	Tim pelaksana Penanganan Satwa Transit dan Konflik tidak terbentuk	R123
		Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Satwa Transit dan Konflik	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Satwa Transit dan Konflik tidak tersusun	R124
		Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Satwa Transit dan Konflik	Satwa konflik/ hasil penyerahan mati	R125
		Menyusun laporan Kegiatan Penanganan Satwa Transit dan Konflik	Laporan Kegiatan Penanganan Satwa Transit dan Konflik tidak tersusun	R126
29.	Evakuasi Kecelakaan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian lingkup TNGGP	Penunjukkan Tim evakuasi berdasarkan adanya laporan kecelakaan	Tim evakuasi kecelakaan pengunjung tidak terbentuk	R127
		Tim evakuasi menyusun rencana evakuasi	Perencanaan evakuasi tidak tersusun	R128

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
		Tim evakuasi berkoordinasi dengan petugas medis	Tim medis pendukung pertolongan korban tidak tersedia	R129
		Tim evakuasi melaksanakan evakuasi kecelakaan	Korban tidak terevakuasi	R130
		Tim evakuasi menyerahkan korban kepada petugas medis	Korban tidak tertangani secara medis	R131
		Tim evakuasi melaporkan hasil evakuasi dan pertolongan kepada korban	Evakuasi tidak terlaporkan	R132
30.	Antisipasi Pengamanan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian Bersama Instansi terkait lingkup TNGGP	Penentuan Personil Kegiatan antisipasi pengamanan pengunjung	Personil tidak terbentuk	R133
		Pelaksanaan Kegiatan antisipasi pengamanan pengunjung	Keterlibatan instansi terkait tidak berjalan	R134
		Penyampaian Laporan Kegiatan antisipasi pengamanan pengunjung	Kegiatan antisipasi pengamanan pengunjung tidak terlaporkan	R135
31.	Monitoring Macan Tutul (Luas Site di Jublegan Cianjur 2.720 Ha, Luas Non Site di Sukabumi dan Bogor Ha)	Penentuan Tim pelaksana kegiatan	Tim pelaksana tidak terbentuk	R136
		Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan	Pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan tidak ada	R137
		Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Macan Tutul	Kegiatan monitoring tidak terlaksana	R138
		Pengolahan dan analisis data hasil monitoring Macan tutul	Data populasi macan tutul tidak tersedia	R139
		Koordinasi dengan narasumber	Tidak ada masukan dari narasumber	R140
		Pembahasan hasil kegiatan monitoring	Pembahasan tidak terlaksana	R141
		Penyusunan Laporan Kegiatan	Laporan tidak tersusun	R142
32.	SMART Patrol Bersama Masyarakat Mitra POLHUT	Penunjukan Tim Smart Patrol bersama MMP	Tim smart patrol bersama MMP tidak terbentuk	R143
		Tim Smart Patrol bersama MMP menyusun rencana patroli	Perencanaan Smart Patrol bersama MMP tidak tersusun	R144
		Tim Smart Patrol bersama MMP melaksanakan patroli	MMP tidak berpartisipasi dalam pengamanan kawasan	R145

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
		Tim Smart Patrol bersama MMP melaporkan hasil patroli	Smart Patrol bersama MMP tidak terlaporkan	R146
33.	Monitoring Elang Jawa (Luas Site di Situgunung 3.477 Ha, Luas Non Site di Cianjur dan Bogor Ha)	Penentuan Tim pelaksana kegiatan	Tim pelaksana tidak terbentuk	R147
		Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan	Pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan tidak ada	R148
		Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Elang jawa	Kegiatan monitoring tidak terlaksana	R149
		Pengolahan dan analisis data hasil monitoring Elang jawa	Data populasi Elang jawa tidak tersedia	R150
		Koordinasi dengan narasumber	Tidak ada masukan dari narasumber	R151
		Pembahasan hasil kegiatan monitoring	Pembahasan tidak terlaksana	R152
		Penyusunan Laporan Kegiatan	Laporan tidak tersusun	R153
34.	Peningkatan Kapasitas Pegawai dan KTH	Identifikasi kebutuhan materi peningkatan kapasitas	Materi peningkatan kapasitas tidak sesuai kebutuhan	R154
		Penyusunan RPK	Pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan tidak ada	R155
		Koordinasi dengan narasumber	Narasumber tidak sesuai dengan tema peningkatan kapasitas	R156
		Pelaksanaan in house training	Tujuan peningkatan kapasitas tidak tercapai	R157
		Pengisian form evaluasi pasca peningkatan kapasitas dan penilaian yang dilakukan oleh atasan	Form evaluasi pasca peningkatan kapasitas tidak terisi dan tidak ada penilaian yang dilakukan oleh atasan	R158
35.	Pembinaan KTH penerima akses pemanfaatan HHBK Pada Bidang PTN II dan III	Penetapan tim pelaksana kegiatan	Tim pelaksana kegiatan tidak terbentuk	R159
		Penyusunan RPK	Pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan tidak ada	R160
		Koordinasi dengan narasumber	Keahlian narasumber tidak sesuai dengan kebutuhan KTH	R161
		Pelaksanaan pembinaan KTH	Tujuan pembinaan KTH tidak tercapai	R162
36.	Operasional Javan Gibbon Centre	Pengadaan pakan satwa	Jenis pakan tidak sesuai dengan rekomendasi rehabilitasi	R163

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
		Pengadaan bahan pendukung kesehatan Satwa	Owa jawa yang direhabilitasi tidak sehat	R164
		Pemeliharaan Kandang Satwa	Kandang tidak layak untuk rehabilitasi Owa jawa	R165
		Pelaporan kegiatan	Kegiatan operasional JGC tidak terlaporkan	R166
37.	Monitoring Owa Jawa (Luas Site di Bogor 2.759 Ha, Luas Non Site di Cianjur dan Sukabumi Ha)	Penentuan Tim pelaksana kegiatan	Tim pelaksana tidak terbentuk	R167
		Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan	Pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan tidak ada	R168
		Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Owa jawa	Kegiatan monitoring tidak terlaksana	R169
		Pengolahan dan analisis data hasil monitoring Owa jawa	Data populasi Owa jawa tidak tersedia	R170
		Koordinasi dengan narasumber	Tidak ada masukan dari narasumber	R171
		Pembahasan hasil kegiatan monitoring	Pembahasan tidak terlaksana	R172
		Penyusunan Laporan Kegiatan	Laporan tidak tersusun	R173
38.	Smart Patrol Pencegahan Kebakaran Hutan/Illegal Logging/Kerusakan Kehati tingkat Bidang Wilayah	Penunjukan Tim Smart Patrol Pencegahan Kebakaran Hutan/Illegal Logging/Kerusakan Kehati	Tim smart patrol Pencegahan Kebakaran Hutan/Illegal Logging/Kerusakan Kehati tidak terbentuk	R174
		Tim Smart Patrol Pencegahan Kebakaran Hutan/Illegal Logging/Kerusakan Kehati menyusun rencana patroli	Perencanaan Smart Patrol Pencegahan Kebakaran Hutan/Illegal Logging/Kerusakan Kehati tidak tersusun	R175
		Tim Smart Patrol Pencegahan Kebakaran Hutan/Illegal Logging/Kerusakan Kehati melaksanakan patroli	MMP/MPA tidak berpartisipasi dalam Pencegahan Kebakaran Hutan/Illegal Logging/Kerusakan Kehati	R176
		Penyusunan Laporan Smart Patrol Pencegahan Kebakaran Hutan/Illegal Logging/Kerusakan Kehati melaporkan hasil patroli	Kegiatan Smart Patrol Pencegahan Kebakaran Hutan/Illegal Logging/Kerusakan Kehati tidak terlaporkan	R177
II	Kegiatan Penunjang			
39.	Evaluasi Perjanjian Kerjasama	Pembentukan Tim Evaluasi Kerjasama	Tidak ada penanggung jawab pelaksanaan evaluasi PKS	R178

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
		Monitoring Tata Waktu Perjanjian Kerjasama	Waktu evaluasi Perjanjian Kerjasama tidak sesuai tata waktu	R179
		Monitoring Pelaporan Rutin (Triwulan, Semester, atau Tahunan)	Kegiatan hasil Perjanjian Kerjasama tidak dilaporkan secara rutin	R180
		Pelaksanaan Monitoring	Terdapat kegiatan dalam RPP dan RKT Perjanjian Kerjasama yang tidak terlaksana	R181
		Pelaksanaan Evaluasi Perjanjian Kerjasama	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dokumen Perjanjian Kerjasama, RPP maupun RKT	R182
40.	Pembahasan/ Penandatanganan Perjanjian Kerjasama	Pembahasan proposal kerjasama	Ruang lingkup dalam proposal tidak sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku	R183
		Pembahasan draft PKS	Hak dan kewajiban para pihak tidak sesuai kebutuhan	R184
		Permohonan persetujuan ke Menteri LHK	Persetujuan membutuhkan waktu lama	R185
		Penandatanganan PKS	PKS tidak tertandatangani	R186
		Penyusunan RPP dan RKT	RPP dan RKT tidak tersusun	R187
41.	Penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2022	Penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2022	Tidak Terbentuknya Tim Penyusun Rencana Kerja	R188
		Pengumpulan Data Terkait Rencana Kerja Ke Resort PTN Masing-masing Bidang Wilayah	Tidak Tersedianya Data dukung dari setiap Resort sehingga keterlambatan pengumpulan data	R189
		Penyusunan Draft Rencana Kerja	Tidak tersusunnya Draft Rencana Kerja	R190
		Pembahasan Draft Rencana Kerja	Tidak Validnya Draft Rencana Kerja	R191
		Pengesahan Rencana Kerja Tahun 2022	Rencana Kerja tidak dapat dijadikan dasar penyusunan RKA KL	R192
42.	Penyusunan RKA-K/L 2022	Kompilasi Data Usulan Kegiatan berdasarkan Prioritas	Tidak tersusunnya data usulan kegiatan berdasarkan prioritas	R193
		Penyusunan Draft RKA KL Tahun 2022	Tidak tersusunnya Draft RKA KL Tahun 2022	R194
		Pembahasan Draft RKA KL Tahun 2022	Tidak Validnya Draft RKA KL	R195

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
43.	Sosialisasi Peraturan Terkait Revisi DIPA dan Pencairan Anggaran TA 2021	Pembentukan SK Tim Sosialisasi Peraturan Terkait Revisi DIPA dan Pencairan Anggaran TA 2021	Tidak terbentuknya Tim Sosialisasi Peraturan Terkait Revisi DIPA dan Pencairan Anggaran TA 2021	R196
		Pembahasan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Terkait Revisi DIPA dan Pencairan Anggaran TA 2021	Tidak dipahaminya proses revisi DIPA dan Pencairan Anggaran TA 2021	R197
44.	Inhouse Training Lingkup Balai Besar	Identifikasi kebutuhan in house training	In house training tidak sesuai kebutuhan	R198
		Penyusunan RPK	Pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan tidak ada	R199
		Koordinasi dengan narasumber	Narasumber tidak sesuai dengan tema in house training	R200
		Pelaksanaan in house training	Tujuan In house training tidak tercapai	R201
45.	Evaluasi Inhouse Training Lingkup Kantor Balai Besar	Pengisian form evaluasi berupa laporan pasca in house training dan penilaian yang dilakukan oleh atasan	Form evaluasi berupa laporan pasca in house training tidak terisi dan tidak ada penilaian yang dilakukan oleh atasan	R202
46.	Fasilitasi Pengamanan dan Pelayanan Kawasan Konservasi	Identifikasi kebutuhan seragam dinas	Pengadaan seragam dinas tidak terlaksana	R203
		Pembelian seragam dinas	Seragam dinas yang dibeli tidak sesuai spesifikasi dan SBU	R204
		Distribusi seragam dinas	Tidak ada dokumen tanda terima pegawai	R205
47.	Fasilitasi Pertemuan Terkait Pengamanan Kawasan BBTNGGP	Identifikasi kebutuhan jamuan tamu	Konsumsi jamuan tamu tidak tersedia	R206
		Pembelian jamuan tamu	Konsumsi jamuan tamu tidak sesuai kebutuhan	R207
48.	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	Penentuan SOP pengecekan kesehatan melalui rapid tes	Target pengecekan kesehatan tidak sesuai SOP	R208
		Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan klinik	Perbedaan pelayanan pengecekan kesehatan pegawai	R209
		Pelaksanaan cek kesehatan pegawai melalui rapid tes	Pelaksanaan rapid tes tidak terlaksana	R210
49.		Pembentukan tim WBK	Tim WBK tidak terbentuk	R211

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
1.	Penyusunan Grand Design Dokumen Zona Integritas Menuju WBK	Sosialisasi dan internalisasai WBK	Informasi WBK tidak sampai kepada seluruh pegawai	R212
		Studi banding pembangunan zona integritas menuju WBK	Pegawai tidak memahami WBK	R213
		Pembahasan dan pencermatan LKE	Penilaian WBK mandiri tidak terlaksana	R214
		Penyusunan dokumen penilaian mandiri pembangunan zona integritas melalui WBK	Tidak diusulkan menjadi calon satker berpredikat WBK	R215
50.	Penghapusan BMN	Pembentukan panitia penghapusan BMN	Panitia penghapusan BMN tidak terbentuk	R216
		Penetapan kondisi BMN	Data kondisi BMN tidak update	R217
		Pembuatan SK Penghentian penggunaan BMN	Data BMN yang digunakan tidak sesuai	R218
		Penginputan di aplikasi SIMAK	Data BMN di aplikasi tidak sesuai dengan kondisi real	R219
		Pengumuman lelang	Lelang tidak tersosialisasikan	R220
		Penghapusan BMN dari aplikasi	Aset BMN tidak ril	R221
51.	Penyusunan Laporan Keuangan SAI dan SIMAK (Bulanan, Semester, Unaudited dan Audited)	Menunjuk operator SAI dan SIMAK	Operator SAI dan SIMAK tidak ditunjuk	R222
		Mengumpulkan dokumen sumber berupa SPM, SSBP, SSPB dan SP2D yang realisasinya terjadi pada bulan pelaporan	Dokumen sumber tidak tersedia	R223
		Penginputan data pada aplikasi SAIBA	data pada aplikasi tidak sesuai pada dokumen sumber	R224
		Mengumpulkan dokumen sumber berupa SPM dan SP2D Belanja Modal	Dokumen sumber belanja modal tidak tersedia	R225
		Penginputan daftar SP2D belanja Modal pada Aplikasi SIMAK	data belanja modal pada aplikasi tidak sesuai pada dokumen sumber	R226
		Pengiriman ADK Simak BMN pada aplikasi SAIBA	Neraca SIMAK dan SAIBA Tidak Sesuai	R227
		Rekonsiliasi Internal	Rekonsilasi internal operator SIMAK dan SAIBA BMN lambat dilaksanakan	R228
52.	Pengelolaan PNBP	Penunjukan petugas pengelola PNBP	Petugas pengelola PNBP tidak terbentuk	R229

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
		Pemungutan dan pembukuan PNBP	Potensi lost PNBP	R230
		Penyetoran PNBP	Penyetoran tidak tepat waktu	R231
		Pelaporan PNBP	Data setoran tidak sesuai dengan jumlah pengunjung	R232
53.	Penyusunan Laporan BMN (Semesteran)	Menginventaris data BMN	Data BMN tidak valid dan terupdate	R233
		Menginput dan memberikan nomor BMN Belanja Modal sesuai daftar SP2D	Penginputan data BMN tidak sesuai dengan daftar SP2D	R234
		Mendistribusikan BMN hasil pengadaan	Pendistribusian hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan dan peruntukan	R235
		Penyusunan Laporan BMN sesuai neraca	Neraca tidak Update	R236
54.	Penyusunan RK BMN	Identifikasi Kebutuhan BMN	Data BMN yang dibutuhkan tidak tersedia	R237
		Pembuatan Rencana Kebutuhan melalui Aplikasi SIMAN	Rencana Kebutuhan BMN tidak sesuai	R238
		Pembuatan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangai Pengguna Barang Atas Kebenaran RKBMN	Kebenaran RK BMN tidak terjamin sesuai kebutuhan	R239
		Pembuatan Surat Pengantar RKBMN yang ditandatangani Pengguna Barang ke Eselon I	RK BMN tidak terkirim ke Eselon I	R240
55.	Pemuktahiran Data Pegawai	Pengumpulan dan Pengolahan Data Pegawai	Data pegawai tidak tersedia	R241
		Digitalisasi Dokumen	Data pegawai tidak bisa diunggah pada aplikasi SIMPEG dan SAPK	R242
		Mengunggah berkas pada aplikasi pada aplikasi SIMPEG dan SAPK	Data pegawai tidak ter-update pada SIMPEG dan tidak terintegrasi dengan SAPK	R243
56.	Penyelenggaraan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional	Pembentukan tim penilai DUPAK	Tim penilai DUPAK tidak terbentuk	R244
		Pengumpulan DUPAK dari JFT oleh Tim Penilai	DUPAK JFT tercecer	R245

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
		Pemaparan DUPAK oleh JFT dihadapan tim penilai dan JFT yang lain	JFT tidak mempresentasikan DUPAKnya dihadapan tim penilai	R246
		Penilaian DUPAK oleh tim penilai	DUPAK tidak dinilai oleh tim penilai	R247
		Tim penilai mengeluarkan hasil penilaian DUPAK	Tim penilai tidak mengeluarkan PAK atau HAPAK	R248
		Tim penilai membuatkan surat pengantar DUPAK dan HAPAK atau PAK, serta mengirimkannya ke Bagian Kepegawaian Eselon I	DUPAK dan HAPAK atau PAK tidak terkirim ke Eselon I	R249
57.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Identifikasi kebutuhan peralatan dan fasilitas kantor	Data peralatan dan fasilitas kantor tidak tersedia	R250
		Pembelian peralatan dan fasilitas yang dibutuhkan	Peralatan dan fasilitas kantor tidak bisa dibeli	R251
		Pencatatan peralatan dan fasilitas ke dalam aset BMN	Peralatan dan fasilitas kantor tidak tercatat sebagai aset BMN	R252
		Distribusi peralatan dan fasilitas	Peralatan dan fasilitas kantor tidak terdistribusikan	R253
58.	Pencetakan Bahan Promosi Pendukung Pengelolaan Kawasan	Pembuatan draft desain masing-masing bahan promosi	Desain tidak sesuai kebutuhan pengelolaan	R254
		Pencetakan bahan promosi	Bahan promosi tidak tercetak	R255
		Input bahan promosi ke dalam barang persediaan	Bahan promosi tidak tercatat dalam barang persediaan	R256
		Distribusi bahan promosi	Bahan promosi tidak terdistribusikan sesuai kebutuhan	R257
59.	Digitalisasi Perpustakaan Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	Pembentukan Tim Digitalisasi Perpustakaan BBTNGGP	Tidak ada penanggung jawab digitalisasi perpustakaan BBTNGGP	R258
		Pemilihan dokumen atau naskah yang akan didigitalisasikan	Dokumen atau naskah yang didigitalisasi tidak sesuai kebutuhan	R259
		Digitalisasi dokumen atau naskah	Dokumen atau naskah yang didigitalisasi tidak tersedia	R260
		Kompilasi hasil digitalisasi dalam katalog perpustakaan digital	Hasil digitalisasi tidak tersusun dalam katalog	R261
		Pengunggahan hasil digitalisasi ke website BBTNGGP	Hasil digitalisasi tidak dapat diakses oleh publik	R262

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
60.	Penyelenggaraan Kegiatan SPIP	Penetapan Satgas SPIP	Satgas SPIP tidak terbentuk	R263
		Sosialisasi proses penyusunan Desain SPIP kepada Satgas SPIP	Satgas SPIP tidak memahami proses penyusunan Desain SPIP	R264
		Satgas SPIP melakukan penyusunan Desain SPIP	Desain SPIP tidak dapat implementatif	R265
		Sosialisasi Desain SPIP	Tidak dipahaminya Desain SPIP	R266
		Menyampaikan Desain SPIP ke Itjen melalui aplikasi online	Desain SPIP tidak tersampaikan ke Itjen melalui aplikasi online	R267
		Satgas SPIP melakukan Pengendalian internal	Tidak terlaksananya pengendalian internal	R268
		Melaporkan progres pengendalian internal kepada Itjen melalui aplikasi online	Progres pengendalian tidak terlaporkan secara periodik	R269
61.	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) 2020	Pengumpulan data dan informasi	Data dan informasi tidak tersedia	R270
		Penyusunan Laporan Kinerja	Dokumen LKj tidak tersusun	R271
		Pembahasan penyusunan LKj	Dokumen LKj tidak akurat	R272
		Penyampaian dokumen LKj ke Eselon I	Dokumen LKj tidak tersampaikan ke Eselon I	R273
62.	Penyusunan Laporan Capaian Renja 2020	Pengumpulan data dan informasi	Data dan informasi tidak tersedia	R274
		Penyusunan Laporan Capaian Renja	Dokumen Laporan Capaian Renja tidak tersusun	R275
		Pembahasan penyusunan Laporan Capaian Renja	Dokumen Laporan Capaian Renja tidak akurat	R276
		Penyampaian dokumen Laporan Capaian Renja ke Eselon I	Dokumen Laporan Capaian Renja tidak tersampaikan ke Eselon I	R277
63.	Penyusunan Laporan Statistik	Pengumpulan data dan informasi	Data dan informasi tidak tersedia	R278
		Penyusunan Laporan Statistik	Dokumen Laporan Statistik tidak tersusun	R279
		Pembahasan penyusunan Laporan Statistik	Dokumen Laporan Statistik tidak akurat	R280
		Penyampaian dokumen Laporan Statistik ke Eselon I	Dokumen Laporan Statistik tidak tersampaikan ke Eselon I	R281

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Risiko Teridentifikasi	Kode
1	2	3	4	5
64.	Perhitungan Dokumen CCO	Pembahasan dokumen CCO dengan pihak ke-3	Tidak sesuainya perhitungan volume dan RAB pada dokumen CCO	R282
		Revisi dokumen CCO	Kerugian negara	R283
65.	Terdapat kerusakan kecil pada pagar shelter dan beda jenis MCB listrik antara dokumen kontrak dan kondisi lapangan	Pembahasan hasil pendampingan auditor bersama pihak ke-3	Tidak sesuainya fakta di lapangan dengan dokumen kontrak	R284
		Perbaikan kerusakan dan ketidaksesuaian berdasarkan dokumen kontrak	Tidak berfungsiya pagar shelter dan listrik secara optimal	R285
66.	Terdapat cat pada dinding bangunan toilet yang mulai kotor	Pembahasan hasil pendampingan auditor bersama pihak ke-3	Tidak sesuainya fakta di lapangan dengan dokumen kontrak	R286
		Perbaikan cat pada dinding bangunan toilet yang kotor	Terganggunya estetika bangunan	R287

Setiap risiko yang teridentifikasi dipetakan untuk mengetahui letak terjadinya risiko (pada capaian kinerja atau capaian keuangan). Untuk ilustrasi peta risiko dari 66 (enam puluh enam) kegiatan (Tabel 3.2) yang teridentifikasi di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2021, dibuat matrik seperti terlihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3. Ilustrasi Peta Risiko

No	Sumber Risiko (Kegiatan))	Wilayah Terjadi Risiko							
		Capaia n Kinerja	Laporan Keuangan						LRA
			Neraca			Aset Tetap			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Kegiatan Utama									
1.	Pengurusan Administrasi Pemegang Senjata Api	R1							
		R2							
		R3							
		R4							
		R5							
		R6							
2.	Pengurusan Administrasi Senjata Api	R7							
		R8							
		R9							
		R10							
3.		R11							

No	Sumber Risiko (Kegiatan))	Wilayah Terjadi Risiko							
		Capai-a n Kinerja	Laporan Keuangan						
			Neraca			LRA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Smart patrol terkait pengamanan jalur pendakian dan wisata alam	R12							
		R13							
		R14							
4.	Patroli Penanganan/ Supervisi Tindak Lanjut Informasi Terhadap Pelaporan Masyarakat/ Gangguan Kawasan	R15							
		R16							
		R17							
		R18							
		R19							
5.	Identifikasi Bioprospecting	R20							
		R21							
		R22							
		R23							
		R24							
		R25							
6.	Pengurusan Administrasi KTA POLHUT	R26							
		R27							
		R28							
		R29							
7.	Evaluasi kemitraan konservasi	R30							
		R31							
		R32							
		R33							
		R34							
		R35							
8.	Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di 3 (Tiga) Bidang Wilayah	R36							
		R37							
		R38							
		R39							
		R40							
		R41							
		R42							

No	Sumber Risiko (Kegiatan))	Wilayah Terjadi Risiko							
		Capai a n Kinerja	Laporan Keuangan						
			Neraca				LRA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Monitoring KTH Wisata (Cimacan, Sindangjaya, Gekbrong, Ambarjaya, Benda dan Cileungsi)	R43							
		R44							
		R45							
		R46							
10.	Pendampingan Kelompok Masyarakat	R47							
		R48							
		R49							
11.	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Pemberian Akses Kelola Terbatas	R50							
		R51							
		R52							
		R53							
12.	Invetarisasi Potensi Satwa Liar Tingkat Resort	R54							
		R55							
		R56							
		R57							
13.	Penandaan Batas Zona Pengelolaan	R58							
		R59							
		R60							
		R61							
		R62							
14.	Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP	R63							
		R64							
		R65							
		R66							
		R67							
		R68							
		R69							
15.	Inventarisasi dan Identifikasi	R70							
		R71							

No	Sumber Risiko (Kegiatan)	Wilayah Terjadi Risiko							
		Capai a n Kinerja	Laporan Keuangan						
			Neraca			LRA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Potensi Zona/ Blok Tradisional Di TNGGP	R72							
		R73							
16.	Identifikasi Aspek Lingkungan Pendukung ISO 14001:2015 / Pendampingan ISO 9001:2015	R74							
		R75							
17.	Audit Eksternal ISO	R76							
		R77							
		R78							
18.	Audit Internal ISO	R79							
		R80							
		R81							
		R82							
19.	Training ISO 14001:2015 (Audit dan Pemahaman)	R83							
		R84							
		R85							
		R86							
		R87							
		R88							
20.	Pengkayaan (25 Ha)	R89							
		R90							
		R91							
		R92							
21.	Pembibitan Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem	R93							
		R94							
		R95							
		R96							
22.	Pemulihan Ekosistem Dengan Mekanisme Alam	R97							
		R98							
		R99							
		R100							

No	Sumber Risiko (Kegiatan))	Wilayah Terjadi Risiko							
		Capai a n Kinerja	Laporan Keuangan						
			Neraca				LRA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Pembibitan Dalam Rangka pemeliharaan Tahun ke 1 (P1) Pemulihan Ekosistem	R101							
		R102							
		R103							
		R104							
24.	Pemeliharaan Tahun I Pemulihan Ekosistem	R105							
		R106							
		R107							
		R108							
		R109							
25.	Pengendalian Jenis Invasif/Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual)	R110							
		R111							
		R112							
		R113							
		R114							
26.	Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan TNGGP	R115							
		R116							
		R117							
		R118							
27.	Pemadaman Kebakaran Bersama Para Pihak	R119							
		R120							
		R121							
		R122							
28.	Penanganan Satwa Transit dan Konflik	R123							
		R124							
		R125							
		R126							
29.	Evakuasi Kecelakaan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian lingkup TNGGP	R127							
		R128							
		R129							
		R130							
		R131							
		R132							

No	Sumber Risiko (Kegiatan))	Wilayah Terjadi Risiko								
		Capaia n Kinerja	Laporan Keuangan						LRA	
			Neraca			Aset			Pend a- pata n	Belanj a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30.	Antisipasi Pengamanan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian Bersama Instansi terkait lingkup TNGGP	R133								
		R134								
		R135								
31.	Monitoring Macan Tutul (Luas Site di Jublegan Cianjur 2.720 Ha, Luas Non Site di Sukabumi dan Bogor Ha)	R136								
		R137								
		R138								
		R139								
		R140								
		R141								
		R142								
32.	SMART Patrol Bersama Masyarakat Mitra POLHUT	R143								
		R144								
		R145								
		R146								
33.	Monitoring Elang Jawa (Luas Site di Situgunung 3.477 Ha, Luas Non Site di Cianjur dan Bogor Ha)	R147								
		R148								
		R149								
		R150								
		R151								
		R152								
		R153								
34.	Peningkatan Kapasitas Pegawai dan KTH	R154								
		R155								
		R156								
		R157								
		R158								
35.	Pembinaan KTH penerima akses pemanfaatan HHBK Pada	R159								
		R160								
		R161								
		R162								

No	Sumber Risiko (Kegiatan))	Wilayah Terjadi Risiko							
		Capai-a n Kinerja	Laporan Keuangan						
			Neraca			LRA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bidang PTN II dan III								
36.	Operasional Javan Gibbon Centre	R163 R164 R165 R166							
37.	Monitoring Owa Jawa (Luas Site di Bogor 2.759 Ha, Luas Non Site di Cianjur dan Sukabumi Ha)	R167 R168 R169 R170 R171 R172 R173							
38.	Smart Patrol Pencegahan Kebakaran Hutan/Illegal Logging/Kerusakan Kehati tingkat Bidang Wilayah	R174 R175 R176 R177							
II Kegiatan Penunjang									
39.	Evaluasi Perjanjian Kerjasama	R178 R179 R180 R181 R182							
40.	Pembahasan/ Penandatanganan Perjanjian Kerjasama	R183 R184 R185 R186 R187							
41.	Penyusunan Rencana Kerja	R188 R189							

No	Sumber Risiko (Kegiatan))	Wilayah Terjadi Risiko							
		Capai-a n Kinerja	Laporan Keuangan						
			Neraca				LRA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Balai Besar TNGGP Tahun 2022	R190							
		R191							
		R192							
42.	Penyusunan RKA-K/L 2022	R193							
		R194							
		R195							
43.	Sosialisasi Peraturan Terkait Revisi DIPA dan Pencairan Anggaran TA 2021	R196							
		R197							
44.	Inhouse Training Lingkup Balai Besar	R198							
		R199							
		R200							
		R201							
45.	Evaluasi Inhouse Training Lingkup Kantor Balai Besar	R202							
46.	Fasilitasi Pengamanan dan Pelayanan Kawasan Konservasi	R203							
		R204							
		R205							
47.	Fasilitasi Pertemuan Terkait Pengamanan Kawasan BBTNGGP	R206							
		R207							
48.	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	R208							
		R209							
		R210							

No	Sumber Risiko (Kegiatan))	Wilayah Terjadi Risiko							
		Capai-a n Kinerja	Laporan Keuangan						LRA
			Neraca						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	Penyusunan Grand Design Dokumen Zona Integritas Menuju WBK	R211							
		R212							
		R213							
		R214							
		R215							
50.	Penghapusan BMN					R216	R216		
						R217	R217		
						R218	R218		
						R219	R219		
						R220	R220		
						R221	R221		
51.	Penyusunan Laporan Keuangan SAI dan SIMAK (Bulanan, Semester, Unaudited dan Audited)		R222			R222	R222		
			R223	R223	R223	R223	R223	R223	R223
						R234			
						R235			
				R236		R236			
						R237	R237		
52.	Pengelolaan PNBP					R228	R228		
								R229	
								R230	
								R231	
53.	Penyusunan Laporan BMN (Semesteran)					R233	R233		
						R234	R234		
						R235	R235		
						R236	R236		
54.	Penyusunan RK BMN					R237			

No	Sumber Risiko (Kegiatan))	Wilayah Terjadi Risiko							
		Capaia n Kinerja	Laporan Keuangan						LRA
			Neraca						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						R238			
						R239			
						R240			
55.	Pemuktahiran Data Pegawai	R241							
		R242							
		R243							
56.	Penyelenggaraan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional	R244							
		R245							
		R246							
		R247							
		R248							
		R249							
57.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	R250							
		R251							
		R252							
		R253							
58.	Pencetakan Bahan Promosi Pendukung Pengelolaan Kawasan	R254							
		R255							
					R256				
		R257							
59.	Digitalisasi Perpustakaan	R258							

No	Sumber Risiko (Kegiatan))	Wilayah Terjadi Risiko							
		Capai- an Kinerja	Laporan Keuangan						
			Neraca				LRA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	R259							
		R260							
		R261							
		R262							
	60. Penyelenggaraan Kegiatan SPIP	R263							
		R264							
		R265							
		R266							
		R267							
		R268							
		R269							
	61. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) 2020	R270							
		R271							
		R272							
		R273							
	62. Penyusunan Laporan Capaian Renja 2020	R274							
		R275							
		R276							
		R277							
	63. Penyusunan Laporan Statistik	R278							
		R279							
		R280							
		R281							
	64. Perhitungan Dokumen CCO	R282	R287			R287			
		R283	R288			R288			
	65. Terdapat kerusakan kecil pada pagar shelter dan beda jenis MCB listrik	R284	R292			R292			
		R285	R293			R293			

No	Sumber Risiko (Kegiatan))	Wilayah Terjadi Risiko							
		Capai-a n Kinerja	Laporan Keuangan						
			Neraca			LRA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	antara dokumen kontrak dan kondisi lapangan								
66.	Terdapat cat pada dinding bangunan toilet yang mulai kotor	R286	R294			R294			
		R287	R295			R295			

B. Analisis Risiko

Analisis risiko dilakukan terhadap semua risiko yang telah teridentifikasi untuk menetapkan risiko-risiko yang mempunyai dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan kegiatan. Penetapan risiko signifikan didasarkan pada Bobot Risiko yang diperoleh dari perkalian antara Nilai Skala Dampak (1 s.d 5) dengan Nilai Skala Frekuensi (1 s.d 5). Hasil analisis atas risiko yang teridentifikasi dari 66 (enam puluh enam) kegiatan berisiko (Tabel 3.2) pada tahun 2021, disajikan pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4. Hasil Penilaian Bobot Atas Risiko Teridentifikasi

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi			Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Kegiatan Utama							
1.	Pengurusan Administrasi Pemegang Senjata Api	R1	Daftar personil pemegang senjata api tidak terpenuhi	2	2	4	Tidak Signifikan	
		R2	Persyaratan personil pemegang senjata api tidak terpenuhi	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R3	Uji kompetensi tidak terjadwalkan	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R4	Pelaksanaan uji kompetensi tidak terlaksana	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R5	Pemegang Izin Senjata Api tidak terbit	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R6	Terjadi penyalahgunaan	2	3	6	Tidak Signifikan	

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi			Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
			wewenang penggunaan senjata api					
2.	Pengurusan Administrasi Senjata Api	R7	Dokumen senjata api tidak lengkap	2	2	4	Tidak Signifikan	
		R8	BA pengecekan fisik senjata api tidak terbit	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R9	Senjata api tidak teridentifikasi	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R10	Administrasi senjata api tidak terbit	2	3	6	Tidak Signifikan	
3.	Smart patrol terkait pengamanan jalur pendakian dan wisata alam	R11	Tim smart patrol tidak terbentuk	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R12	Rencana Pelaksanaan Kegiatan tidak tersusun		2	4	Tidak Signifikan	
		R13	Potensial kerugian negara (PNBP)			12	Signifikan	
		R14	Hasil Smart Patrol tidak terlaporkan	2	3	6	Tidak Signifikan	
4.	Patroli Penanganan/ Supervisi Tindak Lanjut Informasi Terhadap Pelaporan Masyarakat/ Gangguan Kawasan	R15	informasi tidak terkonfirmasi	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R16	Sarpras tidak mendukung dan Surat Tugas patroli terlambat	1	2	2	Tidak Signifikan	
		R17	Patroli tidak tepat sasaran	2	2	4	Tidak Signifikan	
		R18	Pengambilan keputusan terlambat			12	Signifikan	
		R19	Dokumentasi hasil Patroli tidak terdigitalisasi	3	2	6	Tidak Signifikan	
5.	Identifikasi Bioprospecting	R20	Tim pengumpul data bioprospecting tidak terbentuk	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R21	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Sample Uji Bioprospecting tidak tersusun		3	2	6	Tidak Signifikan
		R22	Sample Bioprospecting tidak terkumpul	3	2	6	Tidak Signifikan	
		R23	Sample uji bioprospecting rusak	2	3	6	Tidak Signifikan	

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi			Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		R24	Laboratorium dalam rangka Uji Sample Bioprospecting tidak tersedia	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R25	Hasil uji sample laboratorium tidak teranalisa	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R26	Laporan tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan	
6.	Pengurusan Administrasi KTA POLHUT	R27	Kelengkapan Administrasi KTA POLHUT tidak tersedia	2	2	4	Tidak Signifikan	
		R28	Adminitrasasi POLHUT tersampaikan POLDA	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R29	KTA POLHUT tidak diterbitkan POLDA	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R30	KTA POLHUT tidak terdistribusikan kepada personil POLHUT	2	3	6	Tidak Signifikan	
7.	Evaluasi kemitraan konservasi	R31	Tim Evaluasi Kemitraan Konservasi tidak terbentuk	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R32	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kemitraan Konservasi tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R33	Tallysheet Evaluasi Kemitraan Konservasi tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R34	Pelaksanaan kegiatan evaluasi kemitraan konservasi tidak terlaksana	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R35	Hasil evaluasi kemitraan konservasi tidak teranalisa	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R36	Laporan hasil evaluasi kemitraan konservasi tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan	
8.	Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di 3 (Tiga) Bidang Wilayah	R37	SK panitia tidak terbentuk	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R38	Calon peserta pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi	2	3	6	Tidak Signifikan	

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi		Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Masyarakat tidak tepat sasaran				
		R39	Narasumber Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat tidak kompeten	2	3	6	Tidak Signifikan
		R40	Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat tidak terlaksana	2	3	6	Tidak Signifikan
		R41	Laporan Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
		R42	Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat tidak tepat sasaran	2	3	8	Signifikan
9.	Monitoring KTH Wisata (Cimacan, Sindangjaya, Gekbrong, Ambarjaya, Benda dan Cileungsi)	R43	Surat Tugas personil pelaksana Monitoring KTH Wisata tidak terbit	2	2	4	Tidak Signifikan
		R44	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Monitoring KTH Wisata tidak tersusun	2	2	4	Tidak Signifikan
		R45	Kegiatan Monitoring KTH Wisata tidak terlaksana	2	2	4	Tidak Signifikan
		R46	Laporan hasil monitoring KTH Wisata tidak tersusun	2	2	4	Tidak Signifikan
10.	Pendampingan Kelompok Masyarakat	R47	Menugaskan tim	2	2	4	Tidak Signifikan
		R48	Melaksanakan pendampingan	2	2	4	Tidak Signifikan
		R49	Menyusun laporan hasil pendampingan	2	2	4	Tidak Signifikan
11.	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Pemberian Akses Kelola Terbatas	R50	Tim pelaksana Pembentukan Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Pemberian Akses Kelola Terbatas tidak terbentuk	2	2	4	Tidak Signifikan

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi			Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		R51	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Pemberian Akses Kelola Terbatas tidak tersusun	2	2	4	Tidak Signifikan	
		R52	Kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Pemberian Akses Kelola Terbatas tidak terlaksana	2	2	4	Tidak Signifikan	
		R53	Laporan hasil kegiatan Pembentukan Kelompok Masyarakat Dalam Rangka Pemberian Akses Kelola Terbatas tidak tersusun	2	2	4	Tidak Signifikan	
12.	Invetarisasi Potensi Satwa Liar Tingkat Resort	R54	Tim pelaksana Invetarisasi Potensi Satwa Liar Tingkat Resort tidak terbentuk	2	2	4	Tidak Signifikan	
		R55	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Invetarisasi Potensi Satwa Liar Tingkat Resort tidak tersusun	2	2	4	Tidak Signifikan	
		R56	Kegiatan Invetarisasi Potensi Satwa Liar Tingkat Resort tidak terlaksana	2	2	4	Tidak Signifikan	
		R57	Laporan Kegiatan Invetarisasi Potensi Satwa Liar Tingkat Resort tidak tersusun	2	2	4	Tidak Signifikan	
13.	Penandaan Batas Zona Pengelolaan	R58	Tim pelaksana Penandaan Batas Zona Pengelolaan tidak terbentuk	2	2	4	Tidak Signifikan	
		R59	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penandaan Batas Zona Pengelolaan tidak tersusun	2	2	4	Tidak Signifikan	

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi		Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR		
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP	R60	Bahan tanda batas zona pengelolaan tidak tersedia	2	2	4	Tidak Signifikan
		R61	Tanda Batas Zona Pengelolaan tidak terpasang	2	2	4	Tidak Signifikan
		R62	Laporan hasil Kegiatan Penandaan Batas Zona Pengelolaan tidak tersusun	2	2	4	Tidak Signifikan
15.	Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Zona/ Blok Tradisional Di TNGGP	R63	Tim pelaksana Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP tidak terbentuk	2	2	4	Tidak Signifikan
		R64	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
		R65	Koordinasi Kegiatan Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP dengan BIG tidak terlaksana	2	3	6	Tidak Signifikan
		R66	Data hasil Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP tidak teranalisis	2	3	6	Tidak Signifikan
		R67	Ground check lapangan hasil analisis data tutupan lahan tidak terlaksana	2	3	6	Tidak Signifikan
		R68	Peta Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
		R69	Laporan kegiatan Updating Penutupan Lahan Lingkup TNGGP tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
		R70	Tim pelaksana Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Zona/ Blok Tradisional Di TNGGP tidak tebentuk	2	3	6	Tidak Signifikan
		R71	Rencana Pelaksanaan	2	2	4	Tidak Signifikan

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi			Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Zona/ Blok Tradisional Di TNGGP tidak tersusun					
		R72	Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Zona/ Blok Tradisional Di TNGGP tidak terlaksana	2	2	4	Tidak Signifikan	
		R73	Laporan Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Zona/ Blok Tradisional Di TNGGP tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan	
16.	Identifikasi Aspek Lingkungan Pendukung ISO 14001:2015 / Pendampingan ISO 9001:2015	R74	Koordinasi dengan konsultan tidak terlaksana	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R75	Sertifikat ISO 9001:2015 tidak terbit	2	3	6	Tidak Signifikan	
17.	Sertifikat ISO 9001:2015 tidak terbit	R76	Konsultan audit ISO tidak tersedia	2	2	4	Tidak Signifikan	
		R77	Konsultan audit pengawasan ISO tidak tersedia	2	2	4	Tidak Signifikan	
		R78	Surat Perintah Kerja (SPK) Audit Eksternal ISO tidak tersusun	2	2	4	Tidak Signifikan	
18.	Audit Internal ISO	R79	Tim Audit Internal ISO tidak terbentuk	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R80	Rencana Pelaksanaan Audit Internal ISO tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R81	Audit Internal ISO tidak terlaksana	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R82	Laporan Hasil Audit Internal ISO tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan	
19.	Training ISO 14001:2015 (Audit dan Pemahaman)	R83	Calon peserta tidak sesuai sasaran	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R84	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Training ISO 14001:2015 tidak tersusun	2	2	4	Tidak Signifikan	

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi		Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR		
1	2	3	4	5	6	7	8
		R85	Narasumber Training ISO 14001:2015 tidak tersedia	2	2	4	Tidak Signifikan
		R86	Training ISO 14001:2015 tidak terlaksana	2	2	4	Tidak Signifikan
		R87	Laporan Training ISO 14001:2015 tidak tersusun	2	2	4	Tidak Signifikan
		R88	Training ISO 14001:2015 tidak sesuai dengan kebutuhan	2	2	4	Signifikan
20.	Pengkayaan (25 Ha)	R89	Pelaksana Kegiatan Pengkayaan tidak terbentuk	2	3	6	Tidak Signifikan
		R90	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengakayaan tidak tersusun	2	2	4	Tidak Signifikan
		R91	Waktu penggeraan melebihi waktu yang ditargetkan	2	3	6	Tidak Signifikan
		R92	Laporan hasil kegiatan pengkayaan tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
21.	Pembibitan Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem	R93	Surat Perintah Kerja (SPK) Pelaksana Pembibitan dalam rangka Pemulihan Ekosistem tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
		R94	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembibitan Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
		R95	Bibit dalam rangka pemulihan ekosistem tidak tersedia	2	3	6	Tidak Signifikan
		R96	Laporan Pembibitan Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
22.	Pemulihan Ekosistem Dengan Mekanisme Alam	R97	Tim Pemulihan Ekosistem Dengan Mekanisme Alam tidak terbentuk	2	3	6	Tidak Signifikan

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi		Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR		
1	2	3	4	5	6	7	8
		R98	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem Dengan Mekanisme Alam tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
		R99	Kawasan dengan kategori kerusakan ringan tidak terpulihkan	2	3	6	Tidak Signifikan
		R100	Laporan kegiatan Pemulihan Ekosistem Dengan Mekanisme Alam tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
23.	Pembibitan Dalam Rangka pemeliharaan Tahun ke 1 (P1) Pemulihan Ekosistem	R101	Surat Perintah Kerja (SPK) Pelaksana Pembibitan Dalam Rangka pemeliharaan Tahun ke 1 (P1) Pemulihan Ekosistem tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
		R102	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembibitan Dalam Rangka pemeliharaan Tahun ke 1 (P1) Pemulihan Ekosistem tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
		R103	Bibit Dalam Rangka pemeliharaan Tahun ke 1 (P1) Pemulihan Ekosistem tidak tersedia	2	3	6	Tidak Signifikan
		R104	Laporan kegiatan Pembibitan Dalam Rangka pemeliharaan Tahun ke 1 (P1) Pemulihan Ekosistem tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
24	Pemeliharaan Tahun I Pemulihan Ekosistem	R105	Personil Pemeliharaan Tahun I Pemulihan Ekosistem tidak ditugaskan	2	3	6	Tidak Signifikan
		R106	Surat Perintah Kerja (SPK) Pemeliharaan Tahun I Pemulihan Ekosistem tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
		R107	Rencana Pelaksanaan Kegiatan	2	3	6	Tidak Signifikan

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi		Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pemeliharaan Tahun I Pemulihan Ekosistem tidak tersusun				
		R108	Kegiatan Pemeliharaan Tahun I Pemulihan Ekosistem tidak terkaksana	2	3	6	Tidak Signifikan
		R109	Laporan Pemeliharaan Tahun I Pemulihan Ekosistem tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
25.	Pengendalian Jenis Invasif/Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual)	R110	Tim Pelaksana Pengendalian Jenis Invasif/Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual) tidak terbentuk	2	3	6	Tidak Signifikan
		R111	Surat Perintah Kerja (SPK) Pengendalian Jenis Invasif/Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual) tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
		R112	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Jenis Invasif/Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual) tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
		R113	Kegiatan Pengendalian Jenis Invasif/Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual) tidak terlaksana	2	3	6	Tidak Signifikan
		R114	Laporan Kegiatan Pengendalian Jenis Invasif/Eksotik Berupa Pohon (Pengendalian Manual) tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
26.	Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan TNGGP	R115	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan TNGGP tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi		Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR		
1	2	3	4	5	6	7	8
		R116	Fasilitator METT tingkat pusat tidak tersedia	2	3	6	Tidak Signifikan
		R117	Nilai METT TNGGP tidak terupdate	2	3	6	Tidak Signifikan
		R118	Laporan Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan TNGGP tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
27.	Pemadaman Kebakaran Bersama Para Pihak	R119	Tim pelaksana Pemadaman Kebakaran Bersama Para Pihak tidak terbentuk	2	3	6	Tidak Signifikan
		R120	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Bersama Para Pihak tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
		R121	Rusaknya kawasan akibat kebaran	2	3	6	Tidak Signifikan
		R122	Laporan Kegiatan Pemadaman Kebakaran Bersama Para Pihak tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
28.	Penanganan Satwa Transit dan Konflik	R123	Tim pelaksana Penanganan Satwa Transit dan Konflik tidak terbentuk	2	3	6	Tidak Signifikan
		R124	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Satwa Transit dan Konflik tidak tersusun	1	3	3	Tidak Signifikan
		R125	Satwa konflik/ hasil penyerahan mati	2	3	6	Tidak Signifikan
		R126	Laporan Kegiatan Penanganan Satwa Transit dan Konflik tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
29.	Evakuasi Kecelakaan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian lingkup TNGGP	R127	Tim evakuasi kecelakaan pengunjung tidak terbentuk	2	3	6	Tidak Signifikan
		R128	Perencanaan evakuasi tidak tersusun	2	2	4	Tidak Signifikan

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi		Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR		
1	2	3	4	5	6	7	8
		R129	Tim medis pendukung pertolongan korban tidak tersedia	2	3	6	Tidak Signifikan
		R130	Korban tidak terevakuasi	2	3	6	Tidak Signifikan
		R131	Korban tertangani tidak secara medis	2	3	6	Tidak Signifikan
		R132	Evakuasi tidak terlaporkan	2	3	6	Tidak Signifikan
30.	Antisipasi Pengamanan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian Bersama Instansi terkait lingkup TNGGP	R133	Personil tidak terbentuk	2	2	4	Tidak Signifikan
		R134	Keterlibatan instansi terkait tidak berjalan	1	1	6	Signifikan
		R135	Kegiatan antisipasi pengamanan pengunjung tidak terlaporkan	2	2	4	Tidak Signifikan
31	Monitoring Macan Tutul (Luas Site di Jublegan Cianjur 2.720 Ha, Luas Non Site di Sukabumi dan Bogor Ha)	R136	Tim pelaksana tidak terbentuk	1	2	2	Tidak Signifikan
		R137	Pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan tidak ada	1	3	3	Tidak Signifikan
		R138	Kegiatan monitoring tidak terlaksana	2	3	6	Tidak Signifikan
		R139	Data populasi macan tutul tidak tersedia	2	3	6	Tidak Signifikan
		R140	Tidak ada masukan dari narasumber	1	2	2	Tidak Signifikan
		R141	Pembahasan tidak terlaksana	1	4	4	Tidak Signifikan
		R142	Laporan tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
32	SMART Patrol Bersama Masyarakat Mitra POLHUT	R143	Tim smart patrol bersama MMP tidak terbentuk	1	2	2	Tidak Signifikan
		R144	Perencanaan Smart Patrol bersama MMP tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
		R145	MMP tidak berpartisipasi dalam pengamanan kawasan	2	3	6	Tidak Signifikan
		R146	Smart Patrol bersama MMP tidak terlaporkan	2	3	6	Tidak Signifikan

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi		Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR		
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	Monitoring Elang Jawa (Luas Site di Situgunung 3.477 Ha, Luas Non Site di Cianjur dan Bogor Ha)	R147	Tim pelaksana tidak terbentuk	1	2	2	Tidak Signifikan
		R148	Pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan tidak ada	1	3	3	Tidak Signifikan
		R149	Kegiatan monitoring tidak terlaksana	2	3	6	Tidak Signifikan
		R150	Data populasi Elang jawa tidak tersedia	2	3	6	Tidak Signifikan
		R151	Tidak ada masukan dari narasumber	1	2	2	Tidak Signifikan
		R152	Pembahasan tidak terlaksana	1	4	4	Tidak Signifikan
		R153	Laporan tersusun tidak	2	3	6	Tidak Signifikan
34.	Peningkatan Kapasitas Pegawai dan KTH	R154	Materi peningkatan kapasitas tidak sesuai kebutuhan	3	2	6	Tidak Signifikan
		R155	Pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan tidak ada	2	3	6	Tidak Signifikan
		R156	Narasumber tidak sesuai dengan tema peningkatan kapasitas	2	3	6	Tidak Signifikan
		R157	Tujuan peningkatan kapasitas tidak tercapai	2	3	6	Tidak Signifikan
		R158	Form evaluasi pasca peningkatan kapasitas tidak terisi dan tidak ada penilaian yang dilakukan oleh atasan	2	3	6	Tidak Signifikan
35.	Pembinaan KTH penerima akses pemanfaatan HHBK Pada Bidang PTN II dan III	R159	Tim pelaksana kegiatan tidak terbentuk	2	3	6	Tidak Signifikan
		R160	Pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan tidak ada	2	3	6	Tidak Signifikan
		R161	Keahlian narasumber tidak sesuai dengan kebutuhan KTH	2	3	6	Tidak Signifikan

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi		Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR		
1	2	3	4	5	6	7	8
		R162	Tujuan pembinaan KTH tidak tercapai	2	3	6	Tidak Signifikan
36.	Operasional Javan Gibbon Centre	R163	Jenis pakan tidak sesuai dengan rekomendasi rehabilitasi	2	3	6	Tidak Signifikan
		R164	Owa jawa yang direhabilitasi tidak sehat	2	3	6	Tidak Signifikan
		R165	Kandang tidak layak untuk rehabilitasi Owa jawa	2	2	4	Tidak Signifikan
		R166	Kegiatan operasional JGC tidak terlaporkan	2	3	6	Tidak Signifikan
37.	Monitoring Owa Jawa (Luas Site di Bogor 2.759 Ha, Luas Non Site di Cianjur dan Sukabumi Ha)	R167	Tim pelaksana tidak terbentuk	1	2	2	Tidak Signifikan
		R168	Pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan tidak ada	1	3	3	Tidak Signifikan
		R169	Kegiatan monitoring tidak terlaksana	2	3	6	Tidak Signifikan
		R170	Data populasi Owa jawa tidak tersedia	2	3	6	Tidak Signifikan
		R171	Tidak ada masukan dari narasumber	1	2	2	Tidak Signifikan
		R172	Pembahasan tidak terlaksana	1	4	4	Tidak Signifikan
		R173	Laporan tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan
38.	Smart Patrol Pencegahan Kebakaran Hutan/Illegal Logging/Kerusakan Kehati tingkat Bidang Wilayah	R174	Tim smart patrol Pencegahan Kebakaran Hutan/Illegal Logging/Kerusakan Kehati tidak terbentuk	1	2	2	Tidak Signifikan
		R175	Perencanaan Smart Patrol Pencegahan Kebakaran Hutan/Illegal Logging/Kerusakan Kehati tidak tersusun	2	3	6	Tidak Signifikan

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi			Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		R176	MMP/MPA tidak berpartisipasi dalam Pencegahan Kebakaran Hutan/Illegal Logging/Kerusakan Kehati	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R177	Kegiatan Smart Patrol Pencegahan Kebakaran Hutan/Illegal Logging/Kerusakan Kehati tidak terlaporkan	2	3	6	Tidak Signifikan	
39.	Evaluasi Perjanjian Kerjasama	R178	Tidak ada penanggung jawab pelaksanaan evaluasi PKS	1	4	4	Tidak Signifikan	
		R179	Waktu evaluasi Perjanjian Kerjasama tidak sesuai tata waktu	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R180	Kegiatan hasil Perjanjian Kerjasama tidak dilaporkan secara rutin	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R181	Terdapat kegiatan dalam RPP dan RKT Perjanjian Kerjasama yang tidak terlaksana	0	1	12	Signifikan	
		R182	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerjasama, RPP maupun RKT	2	1	3	Signifikan	
40.	Pembahasan/ Penandatanganan Perjanjian Kerjasama	R183	Ruang lingkup dalam proposal tidak sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R184	Hak dan kewajiban para pihak tidak sesuai kebutuhan	2	3	6	Tidak Signifikan	
		R185	Persetujuan membutuhkan waktu lama	3	2	6	Tidak Signifikan	
		R186	PKS tidak tertandatangani	1	4	4	Tidak Signifikan	

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi		Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR		
1	2	3	4	5	6	7	8
		R187	RPP dan RKT tidak tersusun	1	4	4	Tidak Signifikan
41.	Penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2022	R188	Tidak Terbentuknya Tim Penyusun Rencana Kerja	2	2	4	Tidak Signifikan
		R189	Tidak Tersedianya Data dukung dan setiap Resort sehingga keterlambatan pengumpulan data			16	Signifikan
		R190	Tidak tersusunnya Draft Rencana Kerja	2	3	6	Tidak Signifikan
		R191	Tidak Validnya Draft Rencana Kerja	3	2	6	Tidak Signifikan
		R192	Rencana Kerja tidak dapat dijadikan dasar penyusunan RKAKL	2	2	4	Tidak Signifikan
42.	Penyusunan RKA-K/L 2022	R193	Tidak tersusunnya data usulan kegiatan berdasarkan prioritas	2	2	4	Tidak Signifikan
		R194	Tidak tersusunnya Draft RKAKL Tahun 2022	3	2	6	Tidak Signifikan
		R195	Tidak Validnya Draft RKAKL	3	2	6	Tidak Signifikan
43.	Sosialisasi Peraturan Terkait Revisi DIPA dan Pencairan Anggaran TA 2021	R196	Tidak terbentuknya Tim Sosialisasi Peraturan Terkait Revisi DIPA dan Pencairan Anggaran TA 2021	3	2	6	Tidak Signifikan
		R197	Tidak dipahaminya proses revisi DIPA dan Pencairan Anggaran TA 2021	3	2	6	Tidak Signifikan
44.	Inhouse Training Lingkup Balai Besar	R198	In house training tidak sesuai kebutuhan	3	2	6	Tidak Signifikan
		R199	Pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan tidak ada	2	3	6	Tidak Signifikan
		R200	Narasumber tidak sesuai dengan tema in house training	2	3	6	Tidak Signifikan

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi		Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR		
1	2	3	4	5	6	7	8
		R201	Tujuan In house training tidak tercapai	2	3	6	Tidak Signifikan
45.	Evaluasi Inhouse Training Lingkup Kantor Balai Besar	R202	Form evaluasi berupa laporan pasca in house training tidak terisi dan tidak ada penilaian yang dilakukan oleh atasan	2	3	6	Tidak Signifikan
46.	Fasilitasi Pengamanan dan Pelayanan Kawasan Konservasi	R203	Pengadaan seragam dinas tidak terlaksana	2	2	4	Tidak Signifikan
		R204	Seragam dinas yang dibeli tidak sesuai spesifikasi dan SBU	3	2	6	Tidak Signifikan
		R205	Tidak ada dokumen tanda terima pegawai	3	2	6	Tidak Signifikan
47.	Fasilitasi Pertemuan Terkait Pengamanan Kawasan BBTNGGP	R206	Konsumsi jamuan tamu tidak tersedia	2	2	4	Tidak Signifikan
		R207	Konsumsi jamuan tamu tidak sesuai kebutuhan	2	2	4	Tidak Signifikan
48.	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	R208	Target pengecekan kesehatan tidak sesuai SOP	2	2	4	Tidak Signifikan
		R209	Perbedaan pelayanan pengecekan kesehatan pegawai	2	2	4	Tidak Signifikan
		R210	Pelaksanaan rapid tes tidak terlaksana	2	2	4	Tidak Signifikan
49.	Penyusunan Grand Design Dokumen Zona Integritas Menuju WBK	R211	Tim WBK tidak terbentuk	2	2	4	Tidak Signifikan
		R212	Informasi WBK tidak sampai kepada seluruh pegawai	2	2	4	Tidak Signifikan
		R213	Pegawai tidak memahami WBK	2	2	4	Tidak Signifikan
		R214	Penilaian mandiri WBK tidak terlaksana	2	2	4	Tidak Signifikan

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi			Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		R215	Tidak diusulkan menjadi calon satker berpredikat WBK	2	2	4	Tidak Signifikan	
50.	Penghapusan BMN	R216	Panitia penghapusan BMN tidak terbentuk	1	4	4	Tidak Signifikan	
		R217	Data kondisi BMN tidak update	2	2	4	Tidak Signifikan	
		R218	Data BMN yang digunakan tidak sesuai	2	2	4	Tidak Signifikan	
		R219	Data BMN di aplikasi tidak sesuai dengan kondisi real	2	2	4	Tidak Signifikan	
		R220	Lelang tidak tersosialisasikan	1	4	4	Tidak Signifikan	
		R221	Aset BMN tidak ril	2	2	4	Tidak Signifikan	
51.	Penyusunan Laporan Keuangan SAI dan SIMAK (Bulanan, Semester, Unaudited dan Audited)	R222	Operator SAI dan SIMAK tidak ditunjuk	1	4	4	Tidak Signifikan	
		R223	Dokumen sumber tidak tersedia	3	2	6	Tidak signifikan	
		R224	data pada aplikasi tidak sesuai pada dokumen sumber	3	2	6	Tidak signifikan	
		R225	Dokumen sumber belanja modal tidak tersedia	3	2	6	Tidak signifikan	
		R226	data balanja modal pada aplikasi tidak sesuai pada dokumen sumber	3	2	6	Tidak signifikan	
		R227	Neraca SIMAK dan SAIBA Tidak Sesuai	3	2	6	Tidak signifikan	
		R228	Rekonsiliasi internal operator SIMAK dan SAIBA BMN jambat dilaksanakan	3	3	3	Signifikan	
52.	Pengelolaan PNBP	R229	Petugas pengelola PNBP tidak terbentuk	2	3	6	Tidak signifikan	
		R230	Potensi lost PNBP	3	2	6	Tidak signifikan	
		R231	Penyetoran tidak tepat waktu	2	3	6	Tidak signifikan	

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi			Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR			
1	2	3	4	5	6	7	8	
		R232	Data setoran tidak sesuai dengan jumlah pengunjung	2	3	6	Tidak signifikan	
53.	Penyusunan Laporan BMN (Semesteran)	R233	Data BMN tidak valid dan terupdate	1	4	4	Tidak signifikan	
		R234	Penginputan data BMN tidak sesuai dengan daftar SP2D	2	2	4	Tidak signifikan	
		R235	Pendistribusian hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan dan peruntukan	1	4	4	Tidak signifikan	
		R236	Neraca tidak Update	2	3	6	Tidak signifikan	
54.	Penyusunan RK BMN	R237	Data BMN yang dibutuhkan tidak tersedia	2	2	4	Tidak signifikan	
		R238	Rencana Kebutuhan BMN tidak sesuai	2	2	4	Tidak signifikan	
		R239	Kebenaran RK BMN tidak terjamin sesuai kebutuhan	2	2	4	Tidak signifikan	
		R240	RK BMN tidak terkirim ke Eselon I	2	2	4	Tidak signifikan	
55.	Pemuktahiran Data Pegawai	R241	Data pegawai tidak tersedia	2	3	6	Tidak signifikan	
		R242	Data pegawai tidak bisa di unggah pada aplikasi SIMPEG dan SAPK	2	3	6	Tidak signifikan	
		R243	Data pegawai tidak ter-update pada SIMPEG dan tidak terintegrasi dengan SAPK	2	3	6	Tidak signifikan	
56.	Penyelenggaraan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional	R244	Tim penilai DUPAK tidak terbentuk	4	1	4	Tidak signifikan	
		R245	DUPAK JFT tercecer	4	1	4	Tidak signifikan	
		R246	JFT tidak mempresentasikan DUPAKnya dihadapan tim penilai	3	2	6	Tidak signifikan	

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi		Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR		
1	2	3	4	5	6	7	8
		R247	DUPAK tidak dinilai oleh tim penilai	4	1	4	Tidak signifikan
		R248	Tim penilai tidak mengeluarkan PAK atau HAPAK	4	1	4	Tidak signifikan
		R249	DUPAK dan HAPAK atau PAK tidak terkirim ke Eselon I	4	1	4	Tidak signifikan
	57. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	R250	Data peralatan dan fasilitas kantor tidak tersedia	2	2	4	Tidak signifikan
		R251	Peralatan dan fasilitas kantor tidak bisa dibeli	2	2	4	Tidak signifikan
		R252	Peralatan dan fasilitas kantor tidak tercatat sebagai aset BMN	1	4	4	Tidak signifikan
		R253	Peralatan dan fasilitas kantor tidak terdistribusikan	2	2	4	Tidak signifikan
	58. Pencetakan Bahan Promosi Pendukung Pengelolaan Kawasan	R254	Desain tidak sesuai kebutuhan pengelolaan	2	3	6	Tidak signifikan
		R255	Bahan promosi tidak tercetak	1	4	4	Tidak signifikan
		R256	Bahan promosi tidak tercatat dalam barang persediaan	2	3	6	Tidak signifikan
		R257	Bahan promosi tidak terdistribusikan sesuai kebutuhan	3	2	6	Tidak signifikan
	59. Digitalisasi Perpustakaan Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	R258	Tidak ada penanggung jawab digitalisasi perpustakaan BBTNGGP	2	3	6	Tidak signifikan
		R259	Dokumen atau naskah yang didigitalisasi tidak sesuai kebutuhan	2	3	6	Tidak signifikan
		R260	Dokumen atau naskah yang didigitalisasi tidak tersedia	2	3	6	Tidak signifikan
		R261	Hasil digitalisasi tidak tersusun dalam katalog	2	3	6	Tidak signifikan
		R262	Hasil digitalisasi tidak dapat diakses oleh publik	1	4	4	Tidak signifikan

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi		Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR		
1	2	3	4	5	6	7	8
60.	Penyelenggaraan Kegiatan SPIP	R263	Satgas SPIP tidak terbentuk	1	5	5	Tidak signifikan
		R264	Satgas SPIP tidak memahami proses penyusunan Desain SPIP	1	5	5	Tidak signifikan
		R265	Desain SPIP tidak dapat implementasi	1	1	12	signifikan
		R266	Tidak dipahaminya Desain SPIP	2	3	6	Tidak signifikan
		R267	Desain SPIP tidak tersampaikan ke Itjen melalui aplikasi online	2	3	6	Tidak signifikan
		R268	Tidak terlaksananya pengendalian internal	2	3	6	Tidak signifikan
		R269	Progres pengendalian tidak terlaporkan secara periodik	2	3	6	Tidak signifikan
61.	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) 2020	R270	Data dan informasi tidak tersedia	2	3	6	Tidak signifikan
		R271	Dokumen LKj tidak tersusun	2	3	6	Tidak signifikan
		R272	Dokumen LKj tidak akurat	2	3	6	Tidak signifikan
		R273	Dokumen LKj tidak tersampaikan ke Eselon I	2	3	6	Tidak signifikan
62.	Penyusunan Laporan Capaian Renja 2020	R274	Data dan informasi tidak tersedia	2	3	6	Tidak signifikan
		R275	Dokumen Laporan Capaian Renja tidak tersusun	2	3	6	Tidak signifikan
		R276	Dokumen Laporan Capaian Renja tidak akurat	2	3	6	Tidak signifikan
		R277	Dokumen Laporan Capaian Renja tidak tersampaikan ke Eselon I	2	3	6	Tidak signifikan
63.	Penyusunan Laporan Statistik	R278	Data dan informasi tidak tersedia	2	3	6	Tidak signifikan
		R279	Dokumen Laporan Statistik tidak tersusun	2	3	6	Tidak signifikan
		R280	Dokumen Laporan Statistik tidak akurat	2	3	6	Tidak signifikan
		R281	Dokumen Laporan Statistik tidak tersampaikan ke Eselon I	2	3	6	Tidak signifikan

No	Kegiatan	Risiko Teridentifikasi		Nilai Risiko		B R	Simpulan
		Kode	Deskripsi Risiko	PR	DR		
1	2	3	4	5	6	7	8
64.	Perhitungan Dokumen CCO	R282	Tidak sesuainya perhitungan volume dan RAB pada dokumen CCO	3	2	6	Tidak signifikan
		R283	Kerugian negara	1	1	16	Signifikan
65.	Terdapat kerusakan kecil pada pagar shelter dan beda jenis MCB listrik antara dokumen kontrak dan kondisi lapangan	R284	Tidak sesuainya fakta di lapangan dengan dokumen kontrak	3	2	6	Tidak signifikan
		R285	Tidak berfungsinya pagar shelter dan listrik secara optimal	3	2	6	Tidak signifikan
66.	Terdapat cat pada dinding bangunan toilet yang mulai kotor	R286	Tidak sesuainya fakta di lapangan dengan dokumen kontrak	3	2	6	Tidak signifikan
		R287	Terganggunya estetika bangunan	3	2	6	Tidak signifikan

Berdasarkan hasil analisis terhadap 66 (enam puluh enam) kegiatan yang teridentifikasi perlu dimonitor sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu: 1) Smart patrol terkait pengamanan jalur pendakian dan wisata alam; 2) Patroli Penanganan/ Supervisi Tindak Lanjut Informasi Terhadap Pelaporan Masyarakat/ Gangguan Kawasan; 3) Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di 3 (Tiga) Bidang Wilayah; 4) Training ISO 14001:2015 (Audit dan Pemahaman); 5) Antisipasi Pengamanan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian Bersama Instansi terkait lingkup TNGGP; 6) Evaluasi Perjanjian Kerjasama; 7) Penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2022; 8) SAI dan SIMAK (Bulanan, Semester, Unaudited dan Audited); 9) Penyelenggaraan Kegiatan SPIP; dan 10) Perhitungan Dokumen CCO.

Dari 66 (enam puluh enam) kegiatan dengan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) risiko teridentifikasi terdapat 11 (sebelas) risiko yang signifikan dari 10 (sepuluh) kegiatan yaitu 5 (lima) kegiatan utama yaitu dari sumber risiko kegiatan: 1) Smart patrol terkait pengamanan jalur pendakian dan wisata alam; 2) Patroli Penanganan/ Supervisi Tindak Lanjut Informasi Terhadap Pelaporan Masyarakat/ Gangguan Kawasan; 3) Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di 3 (Tiga)

Bidang Wilayah; 4) Training ISO 14001:2015 (Audit dan Pemahaman); dan 5) Antisipasi Pengamanan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian Bersama Instansi terkait lingkup TNGGP; serta 5 (lima) kegiatan penunjang yaitu: 6) Evaluasi Perjanjian Kerjasama; 7) Penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2022; 8) SAI dan SIMAK (Bulanan, Semester, Unaudited dan Audited); dan 9) Penyelenggaraan Kegiatan SPIP; dan 10) Perhitungan Dokumen CCO. Untuk jelasnya bisa di lihat pada tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5. Rekapitulasi Risiko Signifikan

No. 1	Kegiatan 2	Tujuan 3	Risiko Signifikan 4
1.	Smart patrol terkait pengamanan jalur pendakian dan wisata alam	Tertib pelaksanaan pendakian dan wisata alam	Potensial kerugian negara (PNBP)
2.	Patroli Penanganan/ Supervisi Tindak Lanjut Informasi Terhadap Pelaporan Masyarakat/ Gangguan Kawasan	Peningkatan keamanan kawasan	Pengambilan keputusan terlambat
3.	Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di 3 (Tiga) Bidang Wilayah	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka pengembangan usaha ekonomi	Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di 3 (Tiga) Bidang Wilayah tidak tepat sasaran
4.	Training ISO 14001:2015 (Audit dan Pemahaman)	Meningkatkan kapasitas petugas TNGGP tentang pemahaman ISO 14001:2015	Training ISO 14001:2015 tidak sesuai dengan kebutuhan
5.	Antisipasi Pengamanan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian Bersama Instansi terkait lingkup TNGGP	Tercapainya pengamanan pengunjung untuk meminimalisir lost PNBP	Keterlibatan instansi terkait tidak berjalan
6.	Evaluasi Perjanjian Kerjasama	Tercapainya kerjasama sesuai dokumen PKS, RPP dan RKT	Terdapat kegiatan dalam RPP dan RKT Perjanjian Kerjasama yang tidak terlaksana
			Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dokumen Perjanjian Kerjasama, RPP maupun RKT

No.	Kegiatan	Tujuan	Risiko Signifikan
1	2	3	4
7.	Penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2022	Tersedianya Rencana Kerja TNGGP Tahun 2022	Tidak Tersedianya Data dukung dari setiap Resort sehingga keterlambatan pengumpulan data
8.	Penyusunan Laporan Keuangan SAI dan SIMAK (Bulanan, Semester, Unaudited dan Audited)	Tertib pelaksanaan Penyusunan LK	Rekonsilasi internal operator SIMAK dan SAIBA BMN lambat dilaksanakan
9.	Penyelenggaraan Kegiatan SPIP	Dokumen SPIP tersusun dengan baik dan benar, serta mendapatkan penilaian memadai	Desain SPIP tidak dapat implementatif
10.	Perhitungan Dokumen CCO	Menindaklanjuti rekomendasi hasil pendampingan auditor/ITJEN KLHK Tahun 2020	Kerugian negara

IV. RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Rencana Kegiatan Pengendalian diutamakan untuk mengatasi risiko-risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi/ kegiatan utama yang telah ditetapkan. Rencana Kegiatan Pengendalian pada prinsipnya berisi kebijakan dan prosedur yang dibuat secara tertulis dan harus dilaksanakan oleh semua pegawai yang terkait.

Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana telah diuraikan pada Bab III di atas, selanjutnya dibuat Rencana Kegiatan Pengendalian. Untuk sumber risiko Smart patrol bersama masyarakat, dibuat Rencana Kegiatan Pengendalian, seperti disajikan pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1. Rencana Pengendalian Prosedur Smart patrol bersama masyarakat

Nama Kegiatan	:	Smart patrol terkait pengamanan jalur pendakian dan wisata alam
Tujuan Kegiatan	:	Tertib pelaksanaan pendakian dan wisata alam

No.	Risiko Signifikan	Kegiatan Pengendaian		Penanggung Jawab
		Kebijakan Pengendalian	SOP Pengendalian	
1	2	3	4	5
1	Potensial kerugian negara (PNBP)	Penerapan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran pendakian (pendaki tanpa izin)	SOP Pengendalian 1	Kepala Bidang Teknis Konservasi

Standard Operational Procedure (SOP) untuk perbaikan kegiatan Smart patrol terkait pengamanan jalur pendakian dan wisata alam di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2021, disajikan pada lampiran 1.

Untuk sumber risiko Pelaksanaan Kegiatan Patroli Penanganan/ Supervisi Tindak Lanjut Informasi Terhadap Pelaporan Masyarakat/ Gangguan Kawasan, dibuat Rencana Kegiatan Pengendalian, seperti disajikan pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2. Rencana Pengendalian Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Patroli Penanganan/ Supervisi Tindak Lanjut Informasi Terhadap Pelaporan Masyarakat/ Gangguan Kawasan

Nama Kegiatan	:	Patroli Penanganan/ Supervisi Tindak Lanjut Informasi Terhadap Pelaporan Masyarakat/ Gangguan Kawasan		
Tujuan Kegiatan	:	Peningkatan keamanan kawasan		

No.	Risiko Signifikan	Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab
		Kebijakan Pengendalian	SOP Pengendalian	
1	2	3	4	5
1	Pengambilan keputusan terlambat	Pelaksanaan proses penanganan Tipihut	SOP 2 (Pelaksanaan proses penanganan Tipihut)	Kepala Bidang Teknis Konservasi

Standard Operational Prosedure (SOP) untuk perbaikan kegiatan Patroli Penanganan/ Supervisi Tindak Lanjut Informasi Terhadap Pelaporan Masyarakat/ Gangguan Kawasan di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2021, disajikan pada lampiran 2.

Untuk rencana pengendalian prosedur Kegiatan Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di 3 (Tiga) Bidang Wilayah disajikan pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3. Rencana Pengendalian Kegiatan Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di 3 (Tiga) Bidang Wilayah

Nama Kegiatan	:	Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di 3 (Tiga) Bidang Wilayah		
Tujuan Kegiatan	:	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka pengembangan usaha ekonomi		

No.	Risiko Signifikan	Kegiatan Pengendalian		Penanggungjawab
		Kebijakan Pengendalian	SOP Pengendalian	
1	2	3	4	5
1	Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di 3 (Tiga) Bidang Wilayah tidak tepat sasaran	Memastikan pelaksanaan kegiatan evaluasi pelatihan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	SOP 3 (Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di 3 (Tiga) Bidang Wilayah)	Kepala Bidang Teknis Konservasi

Standard Operational Prosedure (SOP) untuk perbaikan kegiatan Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di 3 (Tiga) Bidang Wilayah di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2021, disajikan pada lampiran 3.

Untuk rencana pengendalian prosedur Training ISO 14001:2015 (Audit dan Pemahaman) disajikan pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4. Rencana Pengendalian Training ISO 14001:2015 (Audit dan Pemahaman)

Nama Kegiatan	:	Training ISO 14001:2015 (Audit dan Pemahaman)
Tujuan Kegiatan	:	Meningkatkan kapasitas petugas TNGGP tentang pemahaman ISO 14001:2015

No.	Risiko Signifikan	Kegiatan Pengendaian		Penanggungjawab
		Kebijakan Pengendalian	SOP Pengendalian	
1	2	3	4	5
1	Training ISO 14001:2015 tidak sesuai dengan kebutuhan	Memastikan pelaksanaan kegiatan evaluasi Training ISO 14001:2015	SOP Pengendalian 4 (Training ISO 14001:2015 (Audit dan Pemahaman))	Kepala Bidang Teknis Konservasi

Standard Operational Prosedure (SOP) untuk perbaikan kegiatan Training ISO 14001:2015 (Audit dan Pemahaman) di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2021, disajikan pada lampiran 4.

Untuk rencana pengendalian prosedur Antisipasi Pengamanan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian Bersama Instansi terkait lingkup TNGGP disajikan pada tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5. Rencana Pengendalian Antisipasi Pengamanan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian Bersama Instansi terkait lingkup TNGGP

Nama Kegiatan	:	Antisipasi Pengamanan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian Bersama Instansi terkait lingkup TNGGP
Tujuan Kegiatan	:	Tercapainya pengamanan pengunjung untuk meminimalisir lost PNBP

No.	Risiko Signifikan	Kegiatan Pengendaian		Penanggungjawab
		Kebijakan Pengendalian	SOP Pengendalian	
1	2	3	4	5
1	Keterlibatan instansi terkait tidak berjalan	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait	SOP Pengendalian 5 (Antisipasi Pengamanan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian Bersama Instansi terkait lingkup TNGGP)	Kepala Bidang Wilayah

Standard Operational Prosedure (SOP) untuk perbaikan kegiatan Antisipasi Pengamanan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian Bersama Instansi terkait lingkup TNGGP di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2021, disajikan pada lampiran 5.

Untuk rencana pengendalian prosedur Evaluasi Perjanjian Kerjasama disajikan pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6. Rencana Pengendalian Evaluasi Perjanjian Kerjasama

Nama Kegiatan	:	Evaluasi Perjanjian Kerjasama
Tujuan Kegiatan	:	Tercapainya kerjasama sesuai dokumen PKS, RPP dan RKT

No.	Risiko Signifikan	Kegiatan Pengendaian		Penanggungjawab
		Kebijakan Pengendalian	SOP Pengendalian	
1	2	3	4	5
1	Terdapat kegiatan dalam RPP dan RKT Perjanjian Kerjasama yang tidak terlaksana	Monitoring kegiatan Perjanjian Kerjasama sesuai tata waktu2	SOP Pengendalian 6 (Evaluasi Perjanjian Kerjasama)	Kepala Bagian Tata Usaha
2	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dokumen Perjanjian	Evaluasi Perjanjian Kerjasama sesuai tata waktu	SOP Pengendalian 7 (Evaluasi Perjanjian Kerjasama)	Kepala Bagian Tata Usaha

No.	Risiko Signifikan	Kegiatan Pengendaian		Penanggungjawab
		Kebijakan Pengendalian	SOP Pengendalian	
1	2	3	4	5
	Kerjasama, RPP maupun RKT			

Standard Operational Prosedure (SOP) untuk perbaikan kegiatan Evaluasi Perjanjian Kerjasama di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2021, disajikan pada lampiran 6 dan 7.

Untuk rencana pengendalian prosedur Penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2022 disajikan pada tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7. Rencana Pengendalian Penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2022

Nama Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2022
 Tujuan Kegiatan : Tersedianya Rencana Kerja TNGGP Tahun 2022

No.	Risiko Signifikan	Kegiatan Pengendaian		Penanggungjawab
		Kebijakan Pengendalian	SOP Pengendalian	
1	2	3	4	5
1	Tidak Tersedianya Data dukung dari setiap Resort sehingga keterlambatan pengumpulan data	Percepatan pengumpulan data dukung terkait Rencana Kerja	SOP Pengendalian 8 (Penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2022)	Kepala Bagian Tata Usaha

Standard Operational Prosedure (SOP) untuk perbaikan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2022 di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2021, disajikan pada lampiran 8.

Untuk rencana pengendalian prosedur Penyusunan Laporan Keuangan SAI dan SIMAK (Bulanan, Semester, Unaudited dan Audited) disajikan pada tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8. Rencana Pengendalian Penyusunan Laporan Keuangan SAI dan SIMAK (Bulanan, Semester, Unaudited dan Audited)

Nama Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan SAI dan SIMAK (Bulanan, Semester, Unaudited dan Audited)
 Tujuan Kegiatan : Tertib pelaksanaan Penyusunan LK

No.	Risiko Signifikan	Kegiatan Pengendaian		Penanggungjawab
		Kebijakan Pengendalian	SOP Pengendalian	
1	2	3	4	5
1	Rekonsiliasi internal operator SIMAK dan SAIBA BMN lambat dilaksanakan	Melaksanakan rekonsiliasi internal operator SAIBA dan SIMAK BMN tepat waktu	SOP Pengendalian 9 (Penyusunan Laporan Keuangan SAI dan SIMAK (Bulanan, Semester, Unaudited dan Audited)	Kepala Bagian Tata Usaha

Standard Operational Prosedure (SOP) untuk perbaikan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SAI dan SIMAK (Bulanan, Semester, Unaudited dan Audited) di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2021, disajikan pada lampiran 9.

Untuk rencana pengendalian prosedur Penyelenggaraan Kegiatan SPIP disajikan pada tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.9. Rencana Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan SPIP

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan SPIP
 Tujuan Kegiatan : Dokumen SPIP tersusun dengan baik dan benar, serta mendapatkan penilaian memadai

No.	Risiko Signifikan	Kegiatan Pengendaian		Penanggungjawab
		Kebijakan Pengendalian	SOP Pengendalian	
1	2	3	4	5
1	Desain SPIP tidak dapat implementatif	Percepatan penyusunan Desain SPIP secara tepat	SOP Pengendalian 10 (Penyelenggaraan Kegiatan SPIP)	Kepala Bagian Tata Usaha

Standard Operational Prosedure (SOP) untuk perbaikan kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan SPIP di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2021, disajikan pada lampiran 10.

Untuk rencana pengendalian prosedur Perhitungan Dokumen CCO disajikan pada tabel 4.10 berikut ini.

Tabel 4.10. Rencana Pengendalian Perhitungan Dokumen CCO

Nama Kegiatan : Perhitungan Dokumen CCO
Tujuan Kegiatan : Menindaklanjuti rekomendasi hasil pendampingan auditor/ITJEN KLHK Tahun 2020

No.	Risiko Signifikan	Kegiatan Pengendaian		Penanggungjawab
		Kebijakan Pengendalian	SOP Pengendalian	
1	2	3	4	5
1	Kerugian negara	Memerintahkan konsultan pengawas untuk cermat dalam menghitung volumen dan RAB	SOP Pengendalian 11 (Perhitungan Dokumen CCO)	Pejabat Pembuat Komitmen

Standard Operational Prosedure (SOP) untuk perbaikan kegiatan Perhitungan Dokumen CCO di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2021, disajikan pada lampiran 11.

V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Tahap ke empat dalam penyusunan desain pengendalian intern yaitu merumuskan rencana tindak terkait dengan informasi dan komunikasi yang menunjang terselenggaranya SPIP dengan baik dan terukur. Materi utama yang disampaikan yaitu Desain Penyelenggaraan SPIP (termasuk SOP-SOP pengendalian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Desain) yang pada hakikatnya merupakan suatu bentuk informasi yang harus dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Dengan dikomunikasikannya desain pengendalian intern beserta SOP-SOP pengendaliannya, maka para pegawai diharapkan akan mengetahui peran dirinya dalam sistem pengendalian intern di instansinya. Atau dengan kata lain, para pegawai diharapkan akan dapat mengetahui tentang *"siapa harus melakukan apa dengan prosedur bagaimana"*.

Informasi dan komunikasi oleh Satgas SPIP Balai Besar TNGGP dilakukan melalui metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung melalui sosialisasi dalam pertemuan rapat koordinasi pegawai lingkup Balai Besar TNGGP yang diselenggarakan setiap bulan, melalui telepon, dan media sosial lainnya. Sedangkan metode tidak langsung dilakukan melalui Surat Edaran (SE), Memorandum, maupun Surat Keputusan Kepala Balai Besar kepada seluruh pegawai lingkup Balai Besar TNGGP.

Rencana tindak penginformasian dan pengkomunikasian Desain Penyelenggaraan SPIP yang akan dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada tahun 2021, disajikan pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1. Informasi dan Komunikasi Terkait Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

No.	Tindakan yang Akan Diambil	Waktu
1	2	3
1	Melaksanakan sosialisasi Desain Penyelenggaraan SPIP beserta seluruh SOP pengendalian kepada semua pegawai melalui forum rapat/ zoom meeting	April 2021
2	Menggandakan sarana dalam mengkomunikasikan informasi yaitu berupa Desain Penyelenggaraan SPIP kepada pegawai, dapat berupa buku pedoman/ surat edaran/ memo/ papan pengumuman/ situs internet/ email/ arahan lisan dan sebagainya	April 2021

No.	Tindakan yang Akan Diambil	Waktu
1	2	3
3	Melaksanakan rapat evaluasi/ review kinerja kegiatan setiap 2 - 3 bulan sekali merupakan mekanisme yang memungkinkan pegawai dapat menyampaikan rekomendasi penyempurnaan suatu kegiatan	Maret, Juni, September, dan Desember 2021
4	Menyiapkan saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan masyarakat untuk pengaduan, pertanyaan, dan lain-lain melalui penyiapan petugas dan kotak pengaduan	Februari sampai Desember 2021, melalui e-mail, website, telepon, dan fax

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan pengendalian intern bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang di dalam Desain Penyelenggaraan SPIP. Pemantauan dilaksanakan secara triwulan dan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan triwulan penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya hasil pemantauan setiap triwulan direkapitulasi untuk mendapatkan hasil pemantauan selama 1 (satu) tahun, yang digunakan antara lain untuk bahan evaluasi pada akhir tahun (atau awal tahun berikutnya). Pemantauan ini menjadi tanggung jawab para penanggung jawab kegiatan terkait, sedangkan Satgas dapat membantu dalam menyusun rekapitulasinya.

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pemantauan, disiapkan terlebih dahulu rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi. Rencana Kegiatan Pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan tahun 2021, tersaji pada tabel 6.1. di bawah ini.

Tabel 6.1. Rencana Pemantauan Kegiatan dan Evaluasi

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pengambilan data dan informasi	Januari 2021	
2.	Penyusunan desain SPIP 2021	Januari 2021	
3.	Pembahasan desain SPIP 2021 dan SOP Pengendalian SPIP 2021	Januari 2021	
4.	Review SOP Pengendalian SPIP 2021	Februari 2021	
5.	Perbaikan Desain SPIP Tahun 2021	Maret – April 2021	
6.	Sosialisasi Desain SPIP Tahun 2021	April – Mei 2021	
7.	Penyusunan Laporan Triwulan I SPIP Tahun 2021	April 2021	
8.	Pemantauan Pelaksanaan SOP SPIP 2021	Maret, Juni, September, dan Desember 2021	
9.	Penyusunan laporan triwulan II SPIP Tahun 2021	Juni 2021	

10.	Penyusunan laporan triwulan III SPIP Tahun 2021	September 2021	
11.	Penyusunan laporan triwulan IV SPIP Tahun 2021	Desember 2021	
12.	Evaluasi Tahunan	Desember 2021	

Hasil Pemantauan Triwulanan dan Hasil Evaluasi Tahunan penyelenggaraan SPIP disajikan dalam format matriks seperti tersaji pada tabel 6.2 dan tabel 6.3, di bawah ini.

Tabel 6.2. Pemantauan Penyelenggaraan SPIP (Triwulanan)

No	Kegiatan/ Kegiatan Lainnya	Kebijakan Pengendalian	Hasil Pantauan	Kendala	Tindakan Perbaikan
1	2	3	4	5	6
1	Smart patrol terkait pengamanan jalur pendakian dan wisata alam	Penerapan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran pendakian (pendaki tanpa izin)			
2.	Patroli Penanganan/ Supervisi Tindak Lanjut Informasi Terhadap Pelaporan Masyarakat/ Gangguan Kawasan	Pelaksanaan proses penanganan Tipihut			
3.	Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di 3 (Tiga) Bidang Wilayah	Memastikan pelaksanaan kegiatan evaluasi Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
4.	Training ISO 14001:2015 (Audit dan Pemahaman)	Memastikan pelaksanaan kegiatan evaluasi Training ISO 14001:2015			
5.	Antisipasi Pengamanan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian Bersama Instansi	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait			

No	Kegiatan/ Kegiatan Lainnya	Kebijakan Pengendalian	Hasil Pantauan	Kendala	Tindakan Perbaikan
1	2	3	4	5	6
	terkait lingkup TNGGP				
6.	Evaluasi Perjanjian Kerjasama	Monitoring kegiatan Perjanjian Kerjasama sesuai tata waktu			
		Pencermatan RPP dan RKT			
7.	Penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2022	Percepatan Pengumpulan Data dukung terkait renja			
8.	Penyusunan Laporan Keuangan SAI dan SIMAK (Bulanan, Semester, Unaudited dan Audited)	Melaksanakan rekonsiliasi SAIBA dan SIMAK BMN tepat waktu.			
9.	Penyelenggaraan Kegiatan SPIP	Percepatan penyusunan Desain SPIP secara tepat			
10.	Perhitungan dokumen CCO	Memerintahkan konsultan pengawas untuk cermat dalam menghitung volume dan RAB			

Tabel 6.3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPIP (Tahunan)

No	Kegiatan/ Kegiatan Lainnya	Kebijakan Pengendalian	Hasil Pantauan	Kendala	Tindakan Perbaikan
1	2	3	4	5	6
1	Smart patrol terkait pengamanan jalur pendakian dan wisata alam	Penerapan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran pendakian (pendaki tanpa izin)			
2	Patroli Penanganan/ Supervisi Tindak Lanjut Informasi	Pelaksanaan proses penanganan Tipihut			

No	Kegiatan/ Kegiatan Lainnya	Kebijakan Pengendalian	Hasil Pantauan	Kendala	Tindakan Perbaikan
1	2	3	4	5	6
	Terhadap Pelaporan Masyarakat/ Gangguan Kawasan				
3	Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di 3 (Tiga) Bidang Wilayah	Memastikan pelaksanaan kegiatan evaluasi Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
4	Training ISO 14001:2015 (Audit dan Pemahaman)	Memastikan pelaksanaan kegiatan evaluasi Training ISO 14001:2015			
5	Antisipasi Pengamanan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian Bersama Instansi terkait lingkup TNGGP	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait			
6	Evaluasi Perjanjian Kerjasama	Monitoring kegiatan Perjanjian Kerjasama sesuai tata waktu Pencermatan RPP dan RKT			
7	Penyusunan Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2022	Percepatan Pengumpulan Data dukung terkait renja			
8	Penyusunan Laporan Keuangan SAI dan SIMAK (Bulanan, Semester, Unaudited dan Audited)	Melaksanakan rekonsiliasi SAIBA dan SIMAK BMN tepat waktu.			
9	Penyelenggaraan Kegiatan SPIP	Percepatan penyusunan Desain SPIP secara tepat			

No	Kegiatan/ Kegiatan Lainnya	Kebijakan Pengendalian	Hasil Pantauan	Kendala	Tindakan Perbaikan
1	2	3	4	5	6
10	Perhitungan dokumen CCO	Memerintahkan konsultan pengawas untuk cermat dalam menghitung volume dan RAB			

VII. PENUTUP

Desain penyelenggaraan SPIP ini memberikan gambaran arah kebijakan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP). Desain ini disusun berdasarkan kondisi yang ada saat ini dan pemikiran-pemikiran ke depan tentang kondisi yang ingin dicapai dari hasil penyelenggaraan SPIP BBTNGGP. Isi desain ini masih memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan di kemudian hari terkait dengan penyelenggaran yang masih berada pada tahap awal.

Dengan adanya desain ini diharapkan dapat memberikan kesamaan persepsi dan sebagai acuan bagi seluruh pegawai Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dalam menyelenggarakan SPIP, agar pelaksanaan semua kegiatan berjalan secara efektif dan efisien, dapat mewujudkan Laporan Keuangan yang handal, terjaminnya keamanan aset-aset Barang Milik Negara (BMN), dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga penyelenggaraan SPIP dapat berjalan dengan efektif dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan *good governance*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
Jl. Raya Cibodas PO Box 3 Sdl Telefax : +62-263-512776/0263519415
E-mail :info@gedepangrango.org web :www.gedepangrango.org
CIPANAS-CIANJUR-JAWA BARAT (43253) INDONESIA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
SATUAN KERJA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
TAHUN 2021**



Cibodas, Juli 2021

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

SOP PENGENDALIAN 1
(SMART PATROL TERKAIT PENGAMANAN JALUR PENDAKIAN DAN WISATA ALAM)

1. Risiko yang akan diatasi : Potensial kerugian negara (PNBP)
2. Kebijakan pengendalian : Penerapan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran pendakian (pendaki tanpa izin)
3. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut:
 - a. Tim Smart Patrol melakukan pendataan terhadap pendaki tanpa izin;
 - b. Tim Smart Patrol mensosialisasikan kepada pendaki tanpa izin tentang SK Pembinaan Kegiatan Pendakian terhadap Pendaki Tanpa Izin;
 - c. Apabila pendaki tanpa izin ditemukan di pintu masuk pendakian, Tim Smart Patrol memerintahkan kepada pendaki tanpa izin untuk turun dan tidak melakukan pendakian tanpa izin;
 - d. Apabila pendaki tanpa izin ditemukan sudah berada di jalur pendakian, Tim Smart Patrol memberlakukan SK Pembinaan Kegiatan Pendakian terhadap Pendaki Tanpa Izin;
 - e. Tim Smart Patrol membuat laporan hasil kegiatan.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**

**SOP PENGENDALIAN 2
(PATROLI PENANGANAN/ SUPERVISI TINDAK LANJUT INFORMASI
TERHADAP PELAPORAN MASYARAKAT/ GANGGUAN KAWASAN)**

1. Risiko yang akan diatasi : Pengambilan keputusan terlambat
2. Kebijakan pengendalian : Penanganan terhadap pelaporan masyarakat/ gangguan kawasan
3. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut:
 - a. Tim melakukan ground check terhadap informasi pelaporan masyarakat/ gangguan kawasan;
 - b. Tim membuat laporan hasil ground check;
 - c. Tim menyampaikan laporan kejadian kepada Kepala Bidang Teknis Konservasi dan ditembuskan kepada Kepala Bidang Wilayah;
 - d. Kepala Bidang Teknis Konservasi berkonsultasi dengan Kepala Balai Besar untuk tindakan penyelesaian;
 - e. Kepala Balai Besar memberikan perintah kepada Kepala Bidang Teknis Konservasi untuk penanganan penyelesai terhadap informasi terhadap pelaporan masyarakat/ gangguan kawasan;
 - f. Kepala Bidang Teknis Konservasi bersama tim dan pihak terkait menindaklanjuti terhadap informasi terhadap pelaporan masyarakat/ gangguan kawasan.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**

**SOP PENGENDALIAN 3
(PELATIHAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DI 3 (TIGA) BIDANG WILAYAH)**

1. Resiko yang diatasi : Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat tidak sesuai sasaran
2. Kebijakan pengendalian : Memastikan pelaksanaan kegiatan evaluasi Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
3. Penanggung jawab : Kepala Bidang Teknis Konservasi
4. Prosedur pelaksanaan pengendalian sebagai berikut:
 - a. Panitia pelaksana Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat menyusun materi evaluasi (kuesioner *pre test* dan *post test*);
 - b. Panitia pelaksana Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat menyelenggarakan *pre test* kepada peserta sebelum pelaksanaan pelatihan;
 - c. Panitia pelaksana Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melaksanakan *post test* kepada peserta diakhir pelaksanaan pelatihan;
 - d. Panitia pelaksana Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melaksanakan analisa hasil evaluasi (*pre test* dan *post test*) untuk melihat tingkat kesesuaian dengan kebutuhan;
 - e. Panitia pelaksana Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala Bidang Teknis Konservasi.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

SOP PENGENDALIAN 4
(TRAINING ISO 14001:2015/ AUDIT DAN PEMAHAMAN)

1. Resiko yang diatasi : Training ISO 14001:2015 tidak sesuai sasaran
2. Kebijakan pengendalian : Memastikan pelaksanaan kegiatan evaluasi Training ISO 14001:2015
3. Penanggung jawab : Kepala Bidang Teknis Konservasi
4. Prosedur pelaksanaan pengendalian sebagai berikut:
 - a. Kepala Seksi P2 menyusun materi evaluasi Training ISO 14001:2015 (*kuesioner pre test dan post test*);
 - b. Kepala Seksi P2 menyelenggarakan *pre test* kepada peserta Training ISO 14001:2015 sebelum pelaksanaan pelatihan;
 - c. Kepala Seksi P2 melaksanakan *post test* kepada peserta Training ISO 14001:2015 diakhir pelaksanaan pelatihan;
 - d. Kepala Seksi P2 melaksanakan analisa hasil evaluasi Training ISO 14001:2015 (*pre test dan post test*) untuk melihat tingkat kesesuaian dengan kebutuhan;
 - e. Kepala Seksi P2 melaporkan hasil evaluasi Training ISO 14001:2015 kepada Kepala Bidang Teknis Konservasi.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

SOP PENGENDALIAN 5
(ANTISIPASI PENGAMANAN PENGUNJUNG WISATA ALAM DAN PENDAKIAN
BERSAMA INSTANSI TERKAIT LINGKUP TNGGP)

1. Risiko yang akan diatasi : Potensial kerugian negara (PNBP)
2. Kebijakan pengendalian : Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait
3. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut:
 - a. Koordinator pelaksana kegiatan menyusun daftar instansi terlibat dalam kegiatan ini;
 - b. Koordinator pelaksana kegiatan melakukan konsultasi dengan Kepala Seksi Wilayah dan Kepala Bidang Wilayah;
 - c. Kepala Bidang Wilayah menerbitkan surat perintah kepada koordinator pelaksana untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. Koordinator pelaksana melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang Wilayah.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**

**SOP PENGENDALIAN 6
(EVALUASI PERJANJIAN KERJASAMA)**

1. Risiko yang akan diatasi : kegiatan dalam dokumen RPP dan RKT Perjanjian Kerjasama yang tidak terlaksana
2. Kebijakan pengendalian : Monitoring kegiatan Perjanjian Kerjasama sesuai tata waktu
3. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut:
 - a. Analis Data Kerjasama mengumpulkan data Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada naskah Perjanjian Kerjasama lingkup Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango;
 - b. Analis Data Kerjasama melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam RPP dan RKT berdasarkan laporan dari Mitra dan Bidang PTN Wilayah lokasi kegiatan kerjasama;
 - c. Analis Data Kerjasama mengingatkan Mitra dan Bidang PTN Wilayah apabila terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen RPP dan RKT;
 - d. Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama melaporkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha apabila terdapat Mitra yang belum melaksanakan kegiatan sesuai dokumen RPP dan RKT untuk memberitahukan kepada Mitra secara tertulis;
 - e. Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama menyiapkan konsep surat Kepala Balai Besar untuk memberitahukan kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Mitra dan diajukan kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk mendapatkan paraf persetujuan;
 - f. Bagian Tata Usaha menyampaikan konsep surat yang telah dibubuh paraf persetujuan kepada Kepala Balai Besar;
 - g. Kepala Balai Besar menandatangi surat pemberitahuan keterlambatan pelaksanaan kegiatan kepada Mitra;
 - h. Pengagenda surat memberikan penomoran surat dan mengirimkan kepada Mitra.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**

**SOP PENGENDALIAN 7
(EVALUASI PERJANJIAN KERJASAMA)**

1. Risiko yang akan diatasi : Terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerjasama, RPP maupun RKT
2. Kebijakan pengendalian : Evaluasi Perjanjian Kerjasama sesuai tata waktu
3. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut:
 - a. Analis Data Kerjasama mengumpulkan data Perjanjian Kerjasama, Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada masing-masing naskah Perjanjian Kerjasama lingkup Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango;
 - b. Analis Data Kerjasama melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam RPP dan RKT berdasarkan laporan dari Mitra dan Bidang PTN Wilayah lokasi kegiatan kerjasama;
 - c. Analis Data Kerjasama melaporkan hasil pencermatan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam dokumen RPP dan RKT kepada Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama;
 - d. Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama menyusun konsep Nota Dinas Laporan Hasil Pencermatan Kepala Bagian Tata Usaha kepada Kepala Balai Besar;
 - e. Kepala Bagian Tata Usaha melakukan pencermatan atas konsep Nota Dinas dan menandatanganinya;
 - f. Penggagenda surat memberikan nomor pada Nota Dinas untuk disampaikan kepada Kepala Balai Besar;
 - g. Kepala Balai Besar memerintahkan Tim Evaluasi untuk melaksanakan kegiatan evaluasi.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

SOP PENGENDALIAN 8
(PENYUSUNAN RENCANA KERJA BALAI BESAR TNGGP TAHUN 2022)

1. Risiko yang akan diatasi : Tidak tersedianya data dukung dari setiap resort
2. Kebijakan pengendalian : Percepatan pengumpulan data dukung terkait Rencana Kerja
3. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut:
 - a. Analis Data Anggaran Kegiatan menyusun draft SK Tim Penyusun Renja BBTNGGP Tahun 2022;
 - b. Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama melakukan pencermatan/ koreksi draft SK Tim Penyusun Renja BBTNGGP Tahun 2022;
 - c. Kepala Bagian Tata Usaha melakukan pencermatan/ koreksi draft SK Tim Penyusun Rencana Kerja BBTNGGP Tahun 2022;
 - d. Kepala Bagian Tata Usaha membubuhkan paraf persetujuan terhadap draft SK Tim Penyusun Renja BBTNGGP Tahun 2022 dan menyampaikan kepada Kepala Balai Besar untuk persetujuan dan pengesahan;
 - e. Kepala Balai Besar menandatangani SK Tim Penyusun Rencana Kerja BBTNGGP Tahun 2022;
 - f. Kepala Bagian Tata Usaha melalui Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama mendistribusikan SK Tim Penyusun Renja BBTNGGP Tahun 2022 kepada seluruh anggota Tim.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

SOP PENGENDALIAN 9
(PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SAI DAN SIMAK - BULANAN,
SEMESTERAN, UNAUDITED, DAN AUDITED)

1. Risiko yang akan diatasi : Rekonsiliasi internal operator SAIBA dan SIMAK BMN lambat dilaksanakan
2. Kebijakan pengendalian : Melaksanakan rekonsiliasi internal operator SAIBA dan SIMAK BMN tepat waktu.
3. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut:
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha menugaskan operator BMN dan Petugas SAIBA untuk melaksanakan Rekonsiliasi internal BMN antara petugas SIMAK dan SAIBA dilaksanakan setiap awal bulan, paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;
 - b. Operator SIMAK BMN dan SAIBA melaksanakan rekonsiliasi internal BMN dan SAIBA dilakukan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;
 - c. Melaporkan hasil rekonsiliasi internal ke Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Bagian Tata Usaha sebagai bahan rekonsiliasi dengan KPKNL dan KPPN.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO
SOP PENGENDALIAN 10
(PENYELENGGARAAN KEGIATAN SPIP)**

1. Risiko yang akan diatasi : Desain SPIP tidak tersusun
2. Kebijakan pengendalian : Percepatan penyusunan Desain SPIP secara tepat
3. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut:
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha mengusulkan draft Surat Keputusan (SK) Kepala Balai Besar tentang Penetapan Satgas SPIP kepada Kepala Balai Besar;
 - b. Kepala Balai Besar memerintahkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk membahas draft SK Kepala Balai Besar tentang Penetapan Satgas SPIP;
 - c. Hasil pembahasan Satgas SPIP ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar dan disosialisasikan kepada yang bersangkutan dan seluruh pejabat struktural serta disosialisasikan kepada seluruh pegawai lingkup Balai Besar TNGGP;
 - d. Tim Satgas SPIP melakukan survey Penilaian/ Pemetaan Efektivitas Lingkungan Pengendalian kepada seluruh pegawai dan hasilnya dijadikan sebagai bahan penyusunan desain SPIP;
 - e. Tim Satgas SPIP beserta seluruh pejabat struktural dan setiap bagian mengidentifikasi, memetakan risiko dari kegiatan utama serta kegiatan penujang dan hasilnya sebagai bahan penyusunan desain SPIP;
 - f. Hasil dari identifikasi dan pemetaan risiko yang berisiko signifikan disusun SOP Pengendaliannya;
 - g. Tim Satgas SPIP melakukan penyusunan desain SPIP dan Ketua Satgas SPIP melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai Besar;
 - h. Kepala Balai Besar memerintahkan kepada Ketua Satgas SPIP untuk membahas desain SPIP;
 - i. Ketua Satgas SPIP bersama anggota Satgas SPIP dengan mengundang pejabat struktural dan seluruh bagian melaksanakan pembahasan desain SPIP;
 - j. Tim Satgas SPIP memperbaiki desain SPIP berdasarkan hasil dari pembahasan dan melaporkannya kepada Kepala Balai Besar untuk mendapat pengesahan dan penetapan melalui SK Penetapan Desain SPIP.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

SOP PENGENDALIAN 11
(PERHITUNGAN DOKUMEN CCO)

1. Risiko yang akan diatasi : Tidak akuratnya dokumen CCO
2. Kebijakan pengendalian : Memerintahkan konsultan pengawas untuk cermat dalam menghitung volume dan RAB
3. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut :
 - a. PPK mengundang rapat pembahasan dokumen CCO bersama konsultan pengawas dan penyedia;
 - b. PPK memimpin rapat pembahasan dokumen CCO bersama konsultan pengawas dan penyedia;
 - c. PPK memerintahkan konsultan pengawas untuk memperbaiki dokumen CCO;
 - d. PPK menandatangani hasil perbaikan dokumen CCO.

Cibodas, Juli 2021

Kepala Balai Besar,

